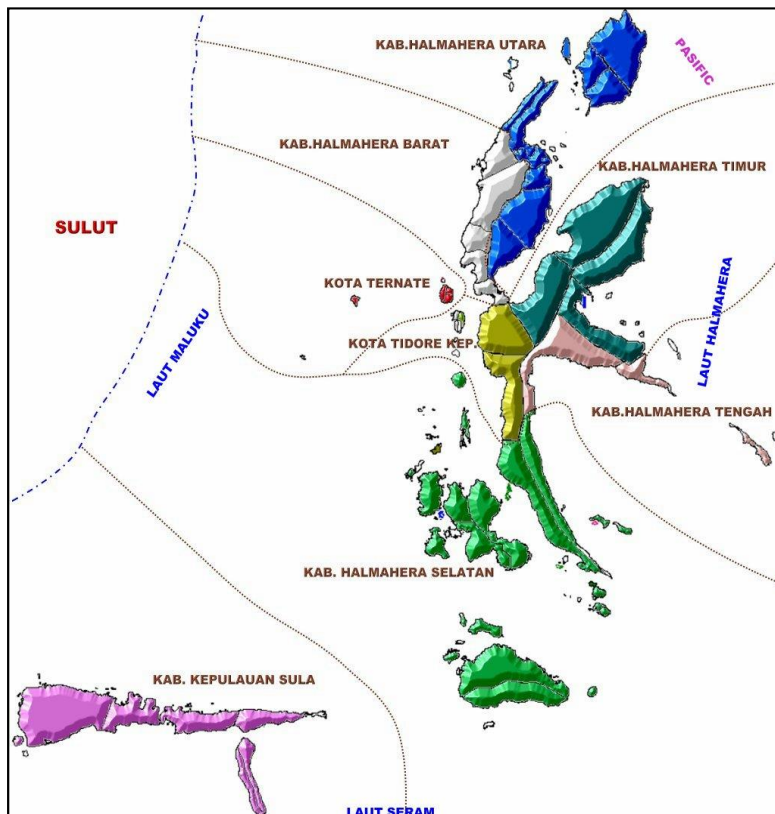




RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dapat kami selesaikan pada waktunya.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara ini merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan untuk melaksanakan prioritas daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Seluruh data terkait keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen renstra ini bersifat indikatif, dengan pengertian bahwa dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat.

Renstra DP3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Renstra ini juga dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara ini.

Sofifi, 03 Februari 2025
Kepala Dinas,

Dra. Hairiah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196707081993032012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu strategis.....	6
II.1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah	6
a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah;.....	6
b. Sumber Daya Dinas P3A Provinsi Maluku Utara	16
c. Kinerja Pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara	26
d. Kelompok sasaran layanan.....	72
II.2 Sub Permasalahan dan isu strategis Dinas P3A Provinsi Maluku Utara..	72
a. Permasalahan pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara.....	72
b. Isu Strategis.....	75
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	78
III.1. Tujuan Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029....	78
III.2. Sasaran Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029...	78
III.3 Strategi Dinas P3A Provinsi Maluku Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstrab Tahun 2025-2029.....	83
III.4 Arah kebijakan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029.....	85
BAB IV Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja DP3A Provinsi Maluku Utara	88
IV.1. Uraian Program	88
IV.2. Uraian Kegiatan	94
IV.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.	94
IV.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung porgram prioritas pembangunan daerah.....	207

IV.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra DP3A Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 melalui indikator utama (IKU).....	208
IV.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan DP3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)..	209
BAB V	Penutup.....	210

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Dokumen Renstra sangat terkait dengan Visi, Misi Gubernur dalam RPJMD. Renstra disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Dalam upaya mencapai keberhasilannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Renstra juga berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi gubernur dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas DP3A Provinsi Maluku Utara serta tolok ukur pencapaiannya.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam konteks ini keberadaan DP3A sebagaimana Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan pengaturan tersebut, lingkup peran DP3A Provinsi Maluku Utara selain meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencakup urusan Keluarga Berencana (KB).

Sehubungan dengan telah disusunnya Rencana Akhir Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Rankhir RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, maka Dinas P3A Provinsi Maluku Utara menindaklanjutinya dengan menyusun Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Renstra ini akan menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3A Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Ranwal RPJMD.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

6. peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
7. Instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.
8. Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara.
9. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2026;
10. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5.3406 tahun 2024, tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
11. Instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari 2 subbab yaitu subbab pertama memuat Gambaran Pelayanan yang menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran Dinas P3A dan subbab kedua memuat permasalahan dan isu strategis yang mengurai tentang permasalahan pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara dan isu strategis Dinas P3A Provinsi Maluku Utara.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menyajikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan berdasarkan tugas dan fungsi Rencana Strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan

Paling sedikit memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah dan juga memuat target pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas P3A tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelayanan DP3A Provinsi Maluku Utara

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan peraturan gubernur maluku utara nomor 41 tahun 2023 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pemenuhan hak anak;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga;
- e. pembinaan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tata administrasi Dinas.

1. KEPALA DINAS,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Tugas dan Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan perjanjian kinerja;
 - b) perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - c) pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan Dinas;
 - d) perumusan kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga Data dan Informasi; dan
 - e) pelaksanaan penilaian kinerja.
- 3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data dan Informasi;
 - c. Kepala Pemenuhan Hak Anak; dan
 - d. Kepala Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

2. SEKRETARIS

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan rencana kegiatan/program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan di kelembagaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, ekonomi sosial politik dan hukum dan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pelebagaan pengarus-utamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan tugas di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian

- penduduk dan keluarga berencana dan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi;
 - d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi; dan
 - f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Bidang, Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan informasi;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemenuhan hak anak terkait pengasuhan, kreativitas, kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan dan kreativitas. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi. Dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi. dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

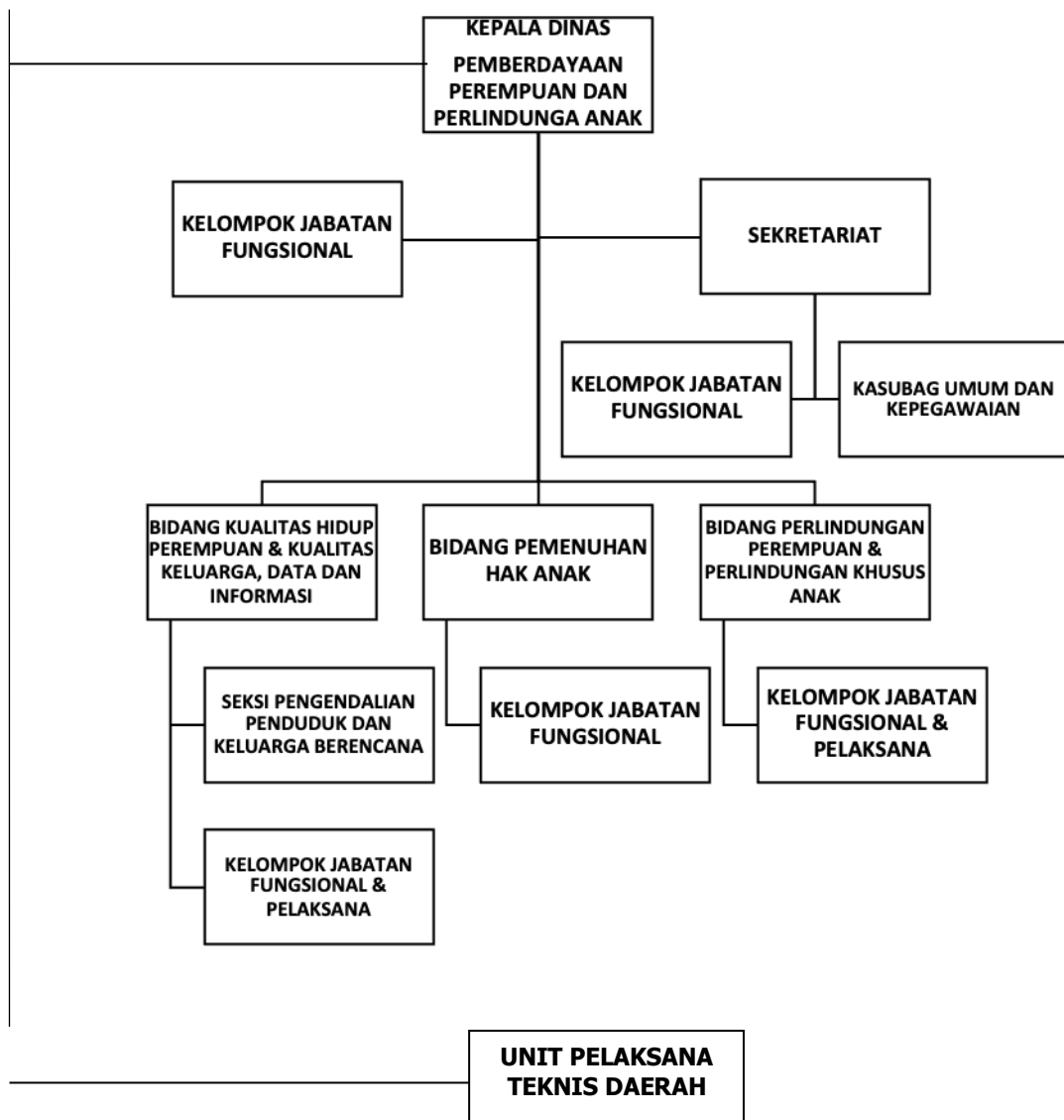
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja

6. Struktur organisasi Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dilihat pada gambar berikut.



Gambar 0.1. Struktur Organisasi Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dengan dasar Peraturan Gubernur Maluku Utara 70 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dengan klasifikasi tipe A.

Amanat pembentukan UPTD PPA di setiap daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada pasal 76 ayat (2), Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi penerimaan dan pengaduan kasus, pelayanan tindak lanjut kasus di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengaduan masyarakat;

- b. Penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan meliputi, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan meliputi, Penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban;
- d. Penyelenggaraan layanan rujukan lanjutan kabupaten/kota lintas daerah;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Penyelenggaraan layanan rujukan lanjutan kabupaten/kota lintas daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta turunannya berupa Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, UPTD PPA mendapat amanat 11 tugas layanan tambahan yaitu:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan.

UPTD PPA Provinsi Maluku Utara memiliki klasifikasi tipe A, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Kepala Sub bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Pengaduan Kasus;
- d. Seksi Pelayanan Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan adalah:

1. Kepala UPTD PPA

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Penerimaan dan Pengaduan Kasus, Pelayanan Tindak Lanjut Kasus, diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2023 tentang susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi maluku utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan meliputi, penjangkauan korban, pengelolaan kasus;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan meliputi, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban;
- d. Penyelenggaraan layanan rujukan lanjutan kabupaten/kota lintas daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. penyelenggaraan layanan rujukan lanjutan kabupaten/kota lintas daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penerimaan dan pengaduan kasus, pelayanan tindak lanjut kasus serta urusan ketatausahaan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional penerimaan dan pengaduan kasus, pelayanan tindak lanjut kasus serta urusan ketatausahaan;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerimaan dan pengaduan kasus, pelayanan tindak lanjut kasus serta urusan ketatausahaan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan dan pengaduan kasus, pelayanan tindak lanjut kasus serta urusan ketatausahaan.
- f. Pelaksanaan penilaian kinerja.

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penerimaan dan Pengaduan Kasus;
- c. Seksi Pelayanan Tindak Lanjut Kasus; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Sub bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjalankan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas UPTD;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi, keuangan, kepegawaian, keprotokolan dan perencanaan program UTPD; dan
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Tata Usaha.

3. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengaduan Kasus

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala UPTD, Kepala Seksi Penerimaan dan Pengaduan Kasus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penerimaan dan pengaduan kasus;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas UPTD;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan penerimaan dan pengaduan kasus; dan
- d. pelaksanaan penetapan rekomendasi hasil pemeriksaan.

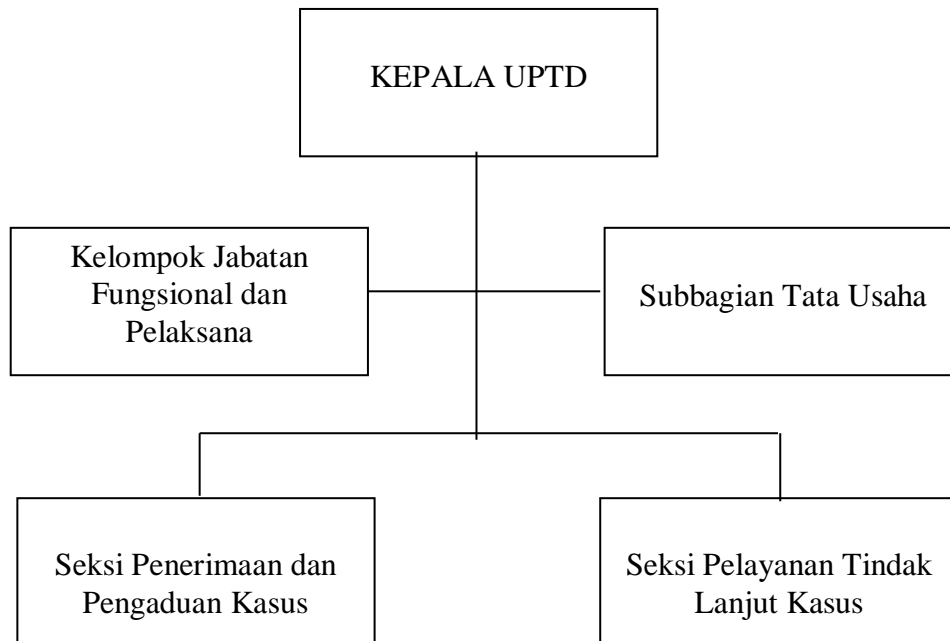
4. Kepala Seksi Pelayanan Tindak Lanjut Kasus

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala UPTD, Kepala Seksi Pelayanan Tindak Lanjut Kasus menjalankan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pelayanan tindaklanjut kasus;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas UPTD;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelayanan tindak lanjut kasus;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan tindaklanjut kasus; dan
- e. Penyusunan rekomendasi pelaksanaan pelayanan tindaklanjut kasus.

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara sebagaimana bagan struktur di bawah ini:

Gambar II.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas



B. Sumber Daya Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya terpenting dari organisasi adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi, karena tanpa orang-orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas sumber daya manusia aparatur menentukan kapasitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasinya. Kemampuan sumber daya aparatur adalah faktor penentu kemampuan instansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara didukung oleh pegawai yang keseluruhan berjumlah 54 orang yang terdiri dari Dinas berjumlah 39 dan UPTD PP dan PA sebanyak 15, terdiri dari 43 dan 11 orang tenaga

P3K. Keadaan pegawai pada Dinas P3A Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta golongan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 0.1. Keadaan Pegawai Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Laki-laki	Perempuan	Total
12	42	54

Tabel 0.2. Keadaan Pegawai Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	6	-	2	12
3	D3	1	4	-	1	6
4	S1	5	23	-	-	28
5	S2	2	6	0	-	8
6	S3	-	-	-	-	-
Total		12	39		3	54

Tabel 0.3. Keadaan Pegawai Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	5	8
2	Golongan III	5	25	30
3	Golongan IV	2	4	6
Total		10	34	54

b. Sumber Daya Manusia UPTD PPA

Dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara didukung oleh tenaga pegawai yang keseluruhan berjumlah 15 orang, terdiri dari 5 PNS, 9 orang tenaga honorer daerah dan 1 orang tenaga

honorar pusat. Tenaga honorar daerah berjumlah 9 terdiri dari 2 orang tenaga ahli hukum, 5 orang pendamping korban, 1 orang tenaga keamanan dan 1 orang *cleaning service*. Sedangkan 1 orang tenaga honorar pusat adalah Operator *Hotline* Pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129), yang pada tahun 2025 tenaga tersebut dikembalikan kepada daerah sebagai penanggung jawab. Keadaan pegawai pada UPTD PPA Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta golongan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 0.4 Keadaan UPTD
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

Laki-laki	Perempuan	Total
6	9	15

**Tabel 0.5 Keadaan UPTD
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	1	1
2	SMA Sederajat	-	-	1	-	1
3	D3	-	1	-	1	2
4	S1	1	3	3	3	10
5	S2	-	-	1	-	1
6	S3	-	-	-	-	-
Total						15

Dalam mengoperasikan UPTD PPA, diperlukan sumber daya manusia yang handal, memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Jika merujuk pada Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA terkait dengan standar jabatan pelaksana dan fungsional yang diperlukan dalam UPTD PPA, maka masih ada beberapa tenaga yang belum tersedia di UPTD PPA Provinsi Maluku Utara.

**Tabel 0.6 Keadaan UPTD
Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Ketersediaan		Jumlah
		Tersedia	Tidak	
1	Psikolog Klinis (JF)		√	
2	Pekerja Sosial (JF)		√	
3	Konselor Psikolog	√		2
	Konselor Hukum		√	
	Mediator	√		1
	Pengadministrasian Umum	√		2
	Pengemudi	√		1
	Penjaga Keamanan	√		1
	Penjaga Asrama	√		1

Kebutuhan tenaga ahli Psikolog Klinis selama ini dipenuhi dengan menggunakan tenaga ahli di luar UPTD PPA, sedangkan pemenuhan konselor hukum dipenuhi oleh tenaga honorer UPTD PPA yang juga merupakan pendamping hukum / pengacara.

c. Sarana dan Prasarana (Aset)

Pada tahun 2022 Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara telah memiliki kantor sendiri yang terletak di jalan Kihajar Dewantara kilometer 40, Sofifi. Dan pada tahun 2023 juga dibangun kantor unit pelayanan terpadu perempuan dan anak Provinsi Maluku Utara serta rumah perlindungan yang lokasinya bersamaan dengan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara juga memiliki sarana prasarana lainnya seperti mobil dan motor perlindungan (MOLIN dan TORLIN) yang diterima dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain menerima mobil dan motor dari kementerian, Dinas juga melakukan pengadaan sebuah mini bus untuk operasional korban kekerasan perempuan dan anak, dan juga aset-aset lainnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

**Tabel II.7
Bangunan Gedung dan Kantor**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baik		1 Unit
2.	Gedung Kantor UPTD PPA	Baik		1 Unit
3.	Rumah Pelindungan Perempuan dan Anak	Baik		2 Unit

Tabel II.8 Kendaraan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Operasional Roda 4	Baik		2 Unit
2	Kendaraan Operasional Roda 2	Baik		19 Unit

Tabel II.9. Kendaraan Operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) Hibah Kementerian PPPA RI	Baik		1 Unit
2	Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) Hibah Kementerian PPPA RI	Baik		2 Unit
3.	Mobil Layanan Perempuan dan Anak (Mini Bus)	Baik		1 Unit

Tabel II.10. Peralatan dan dan Mesin

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Tahun Perolehan	Jumlah
		Baik	Rusak		
1	Lap top		Rusak Berat	2020	6
2	Laptop	Baik		2020	3
3	Laptop		Rusak Berat	2021	7
4	Laptop	Baik		2021	6
5	Laptop		Rusak Berat	2022	1
6	Laptop	Baik		2022	5
7	Laptop	Baik		2023	20
8	Laptop	Baik		2024	1
9	Tablet PC	Baik		2021	2
10	Notebook	Baik		2022	4
11	Tablet (Samsung)	Baik		2023	4
12	Komputer		Rusak Ringan	2021	4
13	Komputer	Baik		2023	2
14	Proyektor/Infokus	Baik		2024	1
15	Werless	Baik		2024	2
16	Printer	Baik		2024	2
17	Printer		Rusak Berat	2020	3
18	Printer	Baik		2021	1
19	Printer	Baik		2021	6
20	Printer		Rusak Berat	2021	14
21	Printer	Baik		2022	9
22	Printer	Baik		2022	3
23	Printer	Baik		2023	11
24	Scanner	Baik		2023	3
25	Televisi	Baik		2022	6
26	Lemari Es	Baik		2022	4
27	Mesin Potong Rumput	Baik		2022	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Tahun Perolehan	Jumlah
		Baik	Rusak		
28	Kamera Foto	Baik		2023	1
29	CCTV	Baik		2022	13
30	SoundSistem		Rusak Ringan	2022	4
31	Breacket Standing	Baik		2022	1
32	Alat Vicon	Baik		2022	1
33	Projektor	Baik		2022	1

Tabel II.11
Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Meubelair)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Tahun Perolehan	Jumlah
		Baik	Rusak		
1.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Baik		2020	1
2	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Baik		2023	1
3.	Meja Pejabat Esselon III	Baik		2022	2
4	Meja Kayu	Baik		2021	5
5	Meja Kayu	Baik		2023	7
6	Meja ½ Biro		Rusak Berat	2021	12
7	Meja ½ Biro	Baik		2023	15
8	Meja Rapat Pejabat Esselon II		Rusak Berat		1
9	Meja Rapat Activ	Baik			12
10	Meja Rapat	Baik		2023	1
11	Meja Panjang Lipat	Baik		2023	14
12	Meja Makan Segi 4	Baik		2022	3
13	Meubelair Lainnya + Kursi	Baik		2022	4
14	Meja Resepsionis	Baik		2022	1
15	Kursi Tamu	Baik		2021	3
16	Kursi Lipat	Baik		2021	45

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Tahun Perolehan	Jumlah
		Baik	Rusak		
17	Kursi Lipat	Baik		2023	42
18	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Baik		2021	1
10	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Baik		2023	4
20	Kursi Rapat	Baik		2022	24
21	Kursi Biasa	Baik		2022	20
22	Kursi Stand Hidrolik/Kursi Putar	Baik		2022	17
23	Lemari Buku Pejabat Esselon II	Baik		2020	1
24	Kursi Besi/Metal	Baik		2022	8
25	Sofa	Baik		2022	7
26	Sofa	Baik		2023	3
27	Lemari Besi/Metal	Baik		2023	8
28	Lemari Sedang Olympic		Rusak Ringan	2021	13
29	Lemari Kayu Pendek Astrobox	Baik		2022	5
30	Lemari Arsip Dinamis		Rusak Berat	2021	2
31	Tempat Tidur Besi	Baik		2021	8

Tabel II.12
Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Tahun Perolehan	Jumlah
		Baik	Rusak		
1.	Rak Piring Aluminium		Rusak Berat	2021	11
2.	Alat Dapur Lainnya	Baik		2021	66
3	Gorden/Kray	Baik		2021	77
4	Gorden/Kray	Baik		2022	87
5	Pot Bunga	Baik		2022	10

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Tahun Perolehan	Jumlah
		Baik	Rusak		
6	Partisi	Baik		2022	1
7	Kompor Gas	Baik		2022	3
8	Alat Dapur Lainnya	Baik		2022	3
9	Dispenser	Baik		2022	3
10	Tangga	Baik		2022	1
11	Bendera dan Gabus	Baik		2022	28
12	Tenda	Baik		2023	7

Tabel II.13 Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Drainase Kantor DP3A	Baik		1
2.	Pilar/tugu/tanda lainnya	Baik		1

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana kantor yang dimiliki oleh Dinas P3A Provinsi Maluku Utara saat ini sudah sangat memadai untuk menunjang kinerja dari ASN.

C. Kinerja Pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

Kinerja pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2020-2024 sesuai target-target kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana tersaji dalam Tabel II.5. Indikator-indikator yang tersaji dalam tabel tersebut hanya mencakup indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas P3A 2020-2024. Adapun Tabel II.6 menyajikan capaian realisasi anggaran program sesuai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas P3A Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2020-2024.

Tabel 0.14. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender	72,3 %	74,2 %	76,1 %	78,1%	80,0%	77,28 %	78, 59 %	78,99 %	79,05 %	80,01%	106%	106%	103%	101%	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	48,9	50,2	51,4	52,7	54,0	46,57 %	47,57 %	46,87 %	52,48	55,41 %					
3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak	20	40	60	80	100	10	10	20	30	30					
4	Total Fertility Rate (TFR)	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,47		3,18	2,41	2,43					
5	Indeks Tata Kelola Dinas P3A	60,0	72,5	75,0	77,5	80,0			67,10	65,65	70,91					

Sumber: Sekretariat Dinas P3A Provinsi Maluku Utara, 2024

Dilihat dari tabel di atas, capaian kinerja dinas pembedayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi maluku utara selama periode tahun 2020-2024 belum mendapatkan capaian yang maksimal, ini dikarenakan dari lima indikator hanya dua indikator yang mendapatkan nilai di atas target yaitu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

Analisis faktor pendorong dan penghambat berikut disusun berdasarkan data capaian indikator kinerja Dinas P3A Provinsi Maluku Utara periode 2020–2024, serta dilengkapi dengan data BPS Maluku Utara terbaru terkait partisipasi angkatan kerja perempuan, indeks pembangunan gender, serta alokasi anggaran daerah.

Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) ±54–55%	<ul style="list-style-type: none"> - Program UMKM dan sektor informal menyerap tenaga kerja perempuan. - Akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi meningkat. - Dukungan kebijakan nasional terkait pemberdayaan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beban ganda perempuan (domestik + ekonomi). - Fasilitas pendukung (daycare, fleksibilitas kerja) masih minim. - TPAK perempuan menurun dari 54,98% (2024) menjadi 53,74% (2025).
Indeks Pembangunan Gender (IDG) = 80,08% (2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan PUG dan ARG mulai diimplementasikan. - Kesadaran gender di masyarakat meningkat. - Dukungan program nasional PPPA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan tetap ada antar jenis kelamin. - Belum konsisten mencapai kategori tinggi di semua kabupaten/kota.
Alokasi Anggaran Program Kependudukan & KB (<1% APBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa daerah menunjukkan alokasi lebih baik, misalnya Kota Ternate 0,64% dari APBD. - Dukungan program BKKBN dan DP3A di tingkat lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Umumnya sangat rendah (0,2–0,3%). - Membatasi jangkauan program pengendalian kelahiran dan perlindungan perempuan. - Ketergantungan tinggi pada dana pusat.

Sumber data: BPS Maluku Utara (2024–2025), SIGA KemenPPPA (2024).

Tabel 0.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran (Rp. Juta)					Realisasi (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi & Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	952.983.000	-				952.595.108					74,00						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	998.000.000	-				995.000.000					100,00						
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	367.502.400	-				367.167.400					55,00						
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	144.425.000	-				143.915.000					100,00					-	
5	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	1.814.339.000	-				806.709.700					73,00					-	
6	Program perlindungan Perempuan dan Khusus Anak	562.650.600	-	-	-	-	559.593.741	-	-	-	-	42,00	-	-	-	-		
7	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		10.405.415.260	14.963.461.150	16.665.283.050	9.773.454.270		10.355.622.646	14.702.152.400	16.220.792.696	7.730.926.919		99,52	98,25	97,33	79,42		
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		891.893.925	2.527.062.702	2.682.011.840	799.112.000		890.916.753	2.484.963.562	2.474.066.400	597.563.540		99,89	98,33	92,25	74,77		
10	Program Perlindungan Perempuan		1.458.191.319	2.425.541.917	2.230.682.050	256.413.500		1.409.581.519	2.417.585.817	2.228.618.000	256.413.500		96,67	99,67	99,91	100,00		
11	Program		638.342.958	3.514.182.650	4.564.246.900	2.299.999.600		635.811.702	3.127.584.450	4.351.168.034	2.299.999.500		99,60	89,00	95,33	100,00		

	Peningkatan Kualitas Keluarga																	
12	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		180.281.451	237.816.000	657.786.590	-		180.280.950	237.816.000	657.530.590	-		100,00	100,00	99,96	-		
13	Program Pemenuhan Hak Anak		469.928.511	1.405.453.600	2.223.053.620	730.018.400		469.593.013	1.404.902.909	2.220.761.700	729.187.500		100,00	99,96	99,90	99,88		
14	Program Perlindungan Khusus Anak		56.780.000	1.500.966.250	3.429.767.610	1.137.566.200		56.405.000	1.476.674.450	3.278.121.640	1.136.766.200		99,34	98,38	95,58	99,93		

Sumber: DP3A Provinsi Maluku Utara

II.3.1. Kinerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi ini mengukur empat (4) Program yaitu, program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan kualitas keluarga, Program Pengelolaan sistem data gender dan anak dan Program Pembinaan Keluarga Berencana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan sikap ,peran , tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi (rekayasa) sosial di tetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang di anggap pantas /tidak menurut norma adat istiadat kepercayaan atau kebiasaan masyarakat .

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Keberhasilan dalam komitmen Pengarusutamaan Gender dapat dilihat dari semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Indikator utama yang dapat menjadi ukurannya yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Perkembangan IPG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 89.61 pada tahun 2019 menjadi 90.91 pada tahun 2024. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada tabel dibawah, IPG Maluku Utara masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Nasional dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2024, Kota Tidore Kepulauan tercatat sebagai wilayah dengan capaian IPG tertinggi yaitu 96,59%, ini tercapai karena pencapaian pembangunan manusia perempuan dan laki-laki relatif merata, serta adanya keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam menurunkan ketimpangan gender di tiga dimensi utama yaitu, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi politik.

Tabel.II.16. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender Menurut Kab/Kota					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	88,20	88,30	88,48	88,89	89,12	89,30
Halmahera Tengah	89,61	89,53	89,78	90,18	90,46	90,60
Kepulauan Sula	92,14	91,97	92,36	92,77	92,85	93,19
Halmahera Selatan	86,60	86,49	87,30	87,38	87,58	87,79
Halmahera Utara	89,35	89,44	89,35	89,73	90,03	90,25
Halmahera Timur	81,41	81,43	81,56	82,09	82,59	82,69
Pulau Morotai	69,86	69,75	69,75	70,85	71,58	72,61
Pulau Taliabu	83,58	83,29	83,29	83,81	84,51	84,93
Ternate	92,10	91,83	91,87	92,28	92,37	92,24
Tidore Kepulauan	95,13	95,47	95,84	96,04	96,34	96,59
MALUKU UTARA	89,61	89,55	89,75	90,30	90,59	90,91

Berdasarkan data indeks pembangunan gender (IPG) diatas, dapat dilihat bahwa kabupaten pulau morotai memiliki IPG yang paling rendah, ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

- **Keterbatasan akses dan layanan publik:** Sebagai daerah terluar, morotai memiliki tantangan dalam penyediaan dan akses masyarakat, termasuk perempuan, terhadap layanan sosial dan hukum memadai;
- **Ketidakesetaraan gender:** Faktor struktural seperti budaya patriarki dan stereotipe gender menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, sehingga menghambat partisipasi aktif dan pemberdayaan mereka dalam berbagai bidang.

- **Kondisi ekonomi dan pendidikan:** tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi perempuan, dapat membatasi peluang mereka dalam kegiatan ekonomi dan pengembangan diri.
- **Kesenjangan spasial:** ada kesenjangan dalam pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks nasional maupun regional, yang juga terjadi antar kabupaten/kota seperti di Morotai.

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian IPG dapat kategorikan sebagai berikut:

Faktor Pendorong

- Penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG).
- Akses layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.
- Dukungan program pemberdayaan perempuan di sektor UMKM dan informal.
- Kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender mulai meningkat.

Faktor Penghambat

- Ketimpangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan masih tinggi.
- Beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan ekonomi.
- Keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan.
- Disparitas antar wilayah kabupaten/kota dalam pencapaian IPG.

Secara umum, Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan capaian positif dalam pembangunan berbasis gender. Namun, agar target IPG dapat mencapai nilai yang maksimal diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Memperluas akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan jabatan publik.
3. Meningkatkan program pelatihan dan kewirausahaan berbasis gender.
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PUG.
5. Mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui intervensi khusus di daerah dengan capaian rendah.

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks yang mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, terutam dalam posisi pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya dan pendapatan. Semakin tinggi nilai Indeks Pemberdayaan Gender, maka semakin tinggi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang dicapai disuatu wilayah atau negara.

Komponen utama untuk mengukur Indeks Pemberdayaaan Gender adalah, peran ekonomi, peran politik dan pengambilan keputusan. Unutk mencapai Indeks Pemberdayaa Gender ada beberapa faktor pendukung dan Penghambat yang perlu diperhatikan yaitu:

Faktor Pendukung:

1. Penyediaan data mengenai isu gender menjadi dasar penting untuk merencanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan gender secara efektif;
2. Dibutuhkan dukungan kebijakan dan komitmen anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan gender;
3. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam dalam pelaksanaan program;
4. Memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada perempuan.

Faktor Penghambat:

1. Masih kurangnya Kualitas SDM yang menangani pemberdayaan perempuan;
2. Budaya patriarki masih membebankan peran ganda pada perempuan, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam sektor ekonomi dan politik;
3. Tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah, sehingga menghambat akses mereka ke pekerjaan formal yang berpenghasilan tinggi.

Berikut adalah capaian Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2024.

Tabel II.17. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	66,22	72,36	72,38	70,31	73,55	63,53
Halmahera Tengah	52,2	51,69	51,7	58,34	53,32	54,58
Kepulauan Sula	49,87	45,05	44,68	45,63	44,91	62,58
Halmahera Selatan	47,3	47,29	47,19	46,38	47,19	53,87
Halmahera Utara	66,3	66,53	66,1	65,5	68,4	76,99
Halmahera Timur	50,74	50,84	51,32	50,2	50,05	50,49
Pulau Morotai	55,77	55,71	54,41	53,75	54,56	60,7
Pulau Taliabu	56,73	57,69	58,33	57,14	58,6	57,46
Ternate	74,9	74,96	75,08	74,25	74,45	78,02
Tidore Kepulauan	67,52	67,01	67,32	68,23	67,74	71,54
MALUKU UTARA	77,5	77,28	78,59	78,99	79,05	80,08

Sumber Data BPS

Berdasarkan data Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Utara dari tahun 2019 – 2024 sesuai data BPS, terlihat bahwa Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai terus mengalami penurunan capaian terhadap Indeks Pemberdayaan Gender , hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Keterbatasan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Indeks Pemberdayaan Gender mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, serta peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik dan ekonomi. Hal ini terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah memiliki partisipasi yang rendah dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

2. Hambatan dalam Dimensi Pembangunan Manusia, yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Standar Hidup Layak

Industri Rumahan Perempuan (IR)

Industri rumahan perempuan adalah kegiatan produksi dan usaha yang dilakukan perempuan dari rumah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, seperti produksi makanan, kerajinan tangan, atau jasa. Program pemberdayaan ekonomi melalui industri rumahan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, membuka peluang kerja bagi perempuan, serta meningkatkan pendapatan dan kepercayaan diri mereka, dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai institusi terkait. Industri rumahan perempuan sangat penting sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk menopang keluarga, terutama bagi perempuan kepala keluarga, dan berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga serta ekonomi bangsa.

Tujuan Program Industri Rumahan Perempuan:

1. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menambah penghasilan keluarga;
2. Menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan di rumah.;
3. Berkontribusi pada peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan;
4. Memberikan alternatif bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan wirausaha.

**Tabel II.18. Industri Rumahan (IR)
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2024**

DATA INDUSTRI USAHA RUMAHAN		
Wilayah	2023	2024
Kepulauan Sula	22 Kelompok	0 Kelompok
Halmahera Selatan	38 Kelompok	42 Kelompok
Pulau Morotai	5 Kelompok	0 Kelompok
Ternate	46 Kelompok	56 Kelompok
Tidore Kepulauan	45 Kelompok	55 Kelompok
Halmahera Timur	0 Kelompok	1 Kelompok
MALUKU UTARA	156 Kelompok	154 Kelompok

Sumber Data : DP3A Kabupaten /Kota.

Dari Tabel Data Industri Rumah Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024, sangat nampak bahwa ada Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan jumlah IR dan ada juga yang mengalami pengurangan jumlah IR dan bahkan ada yang sudah tidak memproduksi sama sekali di tahun 2024. Peningkatan jumlah Industri Rumahan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Faktor Ekonomi
 - Kebutuhan Ekonomi menambah pendapatan
 - Peluang Pasar Yang Tersedia
- b. Faktor Sosial
 - Pertumbuhan Penduduk
 - Migrasi Penduduk
- c. Faktor Teknologi
 - Akses Internet dan Pemasaran Digital
 - Kemudahan Manajemen Bisnis
- d. Faktor Kebijakan Pemerintah
 - Dukungan UMKM
 - Perizinan yang Lebih Mudah

Akan tetapi untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Timur terjadi pengurangan bahkan untuk Kabupaten Pulau Morotai sudah tidak ada lagi kegiatan Industri Rumahan, hal ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, krisis ekonomi, persainagn yang ketat, tantangan birokrasi dan biaya operasional yang tinggi, serta tren konsumsi ke produk besar atau manufaktur. Selain itu kurangnya dukungan dan kebijakan yang memihak pada UMKM juga menjadi faktor peghambat perkembangan Industri Rumahan.

Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Analisis Gender adalah Proses analisis data secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadi ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan .

Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan ,manfaat .

Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang di lakukan melalui pengintegrasian ,pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang respons terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di sebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.

Isu Gender adalah Suatu permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki terutama terhadap Perempuan .

Focal Poin PUG adalah Wadah dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.

Perencanaan penganggaran responsif Gender (PPRG) adalah Serangkaian pendekatan untuk pengintegrasian perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran .PPRG bertujuan untuk memastikan akses, partisipasi, dan pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan potensi laki-laki dan perempuan .

Data pembuka wawasan adalah Data yang menunjukan kondisi adanya kesenjangan Gender. Langkah penyusunan PPRG antara lain: Menyusun perencanaan yang responsif Gender, Menyusun GAP, Menyusun GBS,dan menyusun TOR. Berikut adalah tabel penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Tabel II.19. Penyusunan Gender Analysis Pathway

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)								
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : (Program Kegiatan Dinas) Kegiatan : Tujuan : Sasaran :	(Data yang terdiri dari Data Kuantitatif dan Data Kualitatif)	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> <u>Kontrol :</u> <u>Manfaat :</u>	(Penyebab Internal)	(Penyebab Eksternal)				

Partisipasi dan Kesempatan Kerja Perempuan

Angkatan kerja perempuan Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 54.98 persen, meningkat 7.19 persen poin dari tahun 2019 sebesar 47.79 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) angkatan kerja perempuan pada 2024 sebesar 4.3 persen juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 4.8 persen. Perkembangan TPAK dan TPT perempuan Maluku Utara tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 0.20. Perkembangan TPAK Perempuan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 – 2024**

WILAYAH	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	45,23	46,08	46,25	57,06	52,73	56,71
Halmahera Tengah	44,67	50,52	42,88	54,10	54,59	49,51
Kepulauan Sula	50,01	38,87	47,83	35,54	42,86	46,46
Halmahera Selatan	53,10	51,13	52,24	47,72	60,99	63,33
Halmahera Utara	40,39	44,00	47,67	50,32	55,23	59,19
Halmahera Timur	50,14	45,45	42,12	46,81	52,98	50,93
Pulau Morotai	54,06	48,87	51,89	48,26	49,71	51,33
Pulau Taliabu	59,25	54,12	49,83	36,77	37,47	48,02
Ternate	44,43	43,22	43,88	42,16	47,25	51,59
Tidore Kepulauan	48,91	51,35	51,04	49,78	54,80	53,14
MALUKU UTARA	47,79	46,57	47,57	46,87	52,48	54,98

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel Perkembangan TPAK Perempuan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 – 2024 sebesar 47,79 persen dari tahun 2019, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kontribusi terhadap peningkatan TPAK di Maluku Utara, yaitu :

1. Perempuan Maluku Utara Mempunyai kesadaran akan pentingnya bekerja
2. Potensi Sumber Daya Alam di Maluku Utara potensinya sangat besar, sehingga beberapa sektor misalnya pertanian, kelautan, dan pariwisata sangat menjamin perbaikan ekonomi untuk perempuan bekerja disektor-sektor tersebut.
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Upah, peluang kerja yang lebih banyak untuk perempuan dapat meningkatkan perbaikan ekonomi serta tingkat upah yang menarik dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pekerja perempuan.
4. Faktor Pendidikan, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi peningkatan TPAK di Provinsi Maluku Utara, karena dengan pendidikan perempuan bisa bekerja di sektor-sektor yang sangat relevan dengan pendidikan yang dimiliki.

**Gambar 0.21 Perkembangan TPT Perempuan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 - 2024**

WILAYAH	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	3,3	3,26	3,26	3,45	3,77	3,77
Halmahera Tengah	4,04	6,74	4,23	3,06	3,95	3,95
Kepulauan Sula	4,83	4,9	2,78	2,1	2,67	2,67
Halmahera Selatan	4,47	4,4	1,94	1,51	2,44	2,44
Halmahera Utara	5,59	6,49	8,01	6,06	6,53	6,53
Halmahera Timur	4,34	5,21	6,78	5,2	4,66	4,66
Pulau Morotai	4,78	4,7	6,27	4,35	4,56	4,56
Pulau Taliabu	4,68	4,75	6,1	4,17	3,15	3,15
Kota Ternate	5,87	5,8	5,7	5,77	6,62	6,62
Kota Tidore Kepulauan	4,45	4,95	2,81	2,85	3,52	3,52
Maluku Utara	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel Perkembangan TPT Perempuan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2029 di atas menunjukkan terjadinya penurunan tingkat pengangguran perempuan di Maluku Utara sebesar 4,3 persen, hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga berpengaruh dalam pembangunan di Maluku Utara, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya TPT perempuan di Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Peningkatan Investasi
3. Perbaikan Infrastruktur dan Pendidikan
4. Program Pemberdayaan Perempuan
5. Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan investasi secara tidak langsung menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja selain itu ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan perempuan, membuat mereka lebih menarik bagi pemberi kerja. Fungsi pemerintah sangat membantu memberikan program secara spesifik dengan memperdayakan perempuan, memberikan mereka alat dan kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi.

II.3.2. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program-program tertentu. Tujuan utama dari pengendalian penduduk dan KB adalah untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan ekonomi. Pengendalian penduduk bertujuan untuk mengatur jumlah penduduk yang ada, sehingga tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal ini penting agar kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

Program KB adalah program yang dirancang untuk membantu keluarga mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. KB dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengurangi angka kemiskinan dengan cara mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh keluarga.

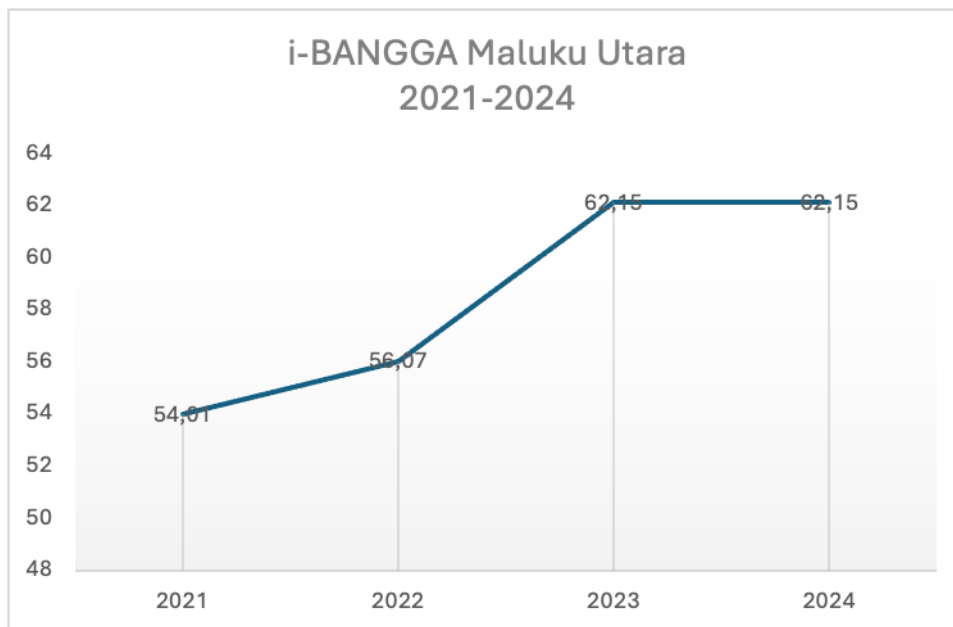
Tujuan Pengendalian Penduduk dan KB adalah **Mengurangi beban terhadap sumber daya alam**: Pertumbuhan penduduk yang terkendali akan membantu penggunaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. **Meningkatkan kesejahteraan keluarga**: Dengan mengatur jumlah anak, keluarga dapat lebih mudah menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. **Pemberdayaan perempuan**: Program KB memungkinkan perempuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan kesehatan dan perencanaan keluarga mereka. **Peningkatan kualitas hidup**: Pengendalian penduduk yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pengendalian penduduk yang baik dan implementasi program KB yang tepat, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan serta ekonomi.

i-BANGGA (Indeks Pembangunan Keluarga untuk Kesejahteraan) adalah sebuah sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau perkembangan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia. Program ini dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai

bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia melalui indikator-indikator yang lebih holistik.

i-BANGGA memiliki tujuan untuk menilai pembangunan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Program ini mengukur seberapa baik kondisi keluarga dalam mengelola kehidupan sehari-hari serta kemampuan mereka untuk mengakses layanan dasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan anggota keluarga. **i-BANGGA** diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, dengan memastikan bahwa seluruh keluarga di Indonesia dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, berdaya, dan mandiri. I-BANGGA Maluku Utara dapat dilihat dari table berikut :

**Grafik II.3 i-BANGGA
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2024**



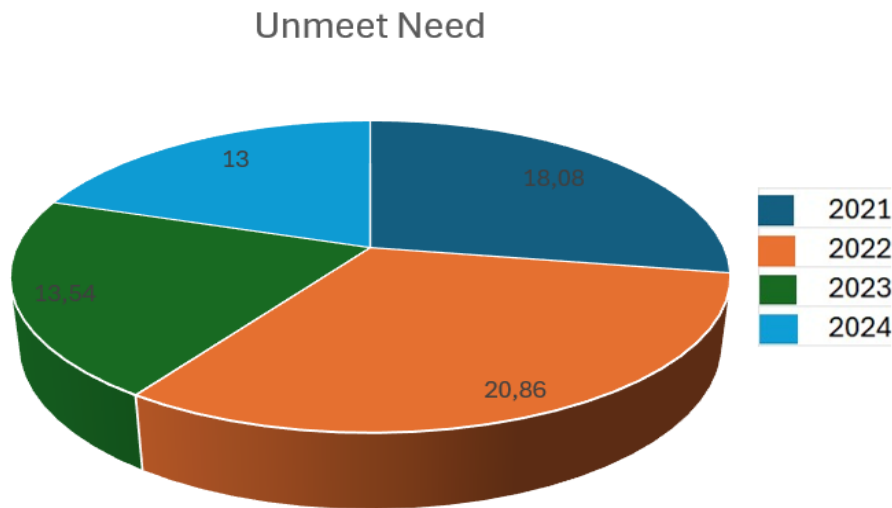
Sumber : SIPERINDU BKKBN

Keterangan dari Grafik i- Bangga Maluku Utara tahun 2021-2024 pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun di Maluku Utara, karena indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas keluarga, dan peningkatan kualitas dapat diartikan

sebagai perbaikan yang bersifat kumulatif dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dukungan keberhasilan program i-Bangga di Maluku Utara adalah karena adanya dukungan kuat dari di kabupaten/kota, keterlibatan aktif masyarakat dalam program keluarga berencana, serta ada juga upaya-upaya inovatif dalam edukasi serta penyediaan layanan kesehatan.

Unmet need atau **kebutuhan yang tidak terpenuhi** dalam konteks Keluarga Berencana (KB) merujuk pada kondisi di mana pasangan usia subur (PUS) yang menginginkan untuk menunda atau menghentikan kelahiran anak, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau metode KB yang efektif. Data **unmet need** ini sering digunakan untuk menggambarkan adanya kesenjangan antara kebutuhan keluarga akan kontrasepsi dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki akses atau tidak menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai. Unmet need menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan kontrasepsi dalam keluarga berencana. Menangani unmet need sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, dan mengurangi angka kematian ibu dan anak. Data unmet need dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses terhadap kontrasepsi dan perencanaan keluarga di seluruh dunia. Data Unmet Need dapat ditunjukkan dalam grafik berikut :

**Grafik II.4 Unmeet Need
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2024**



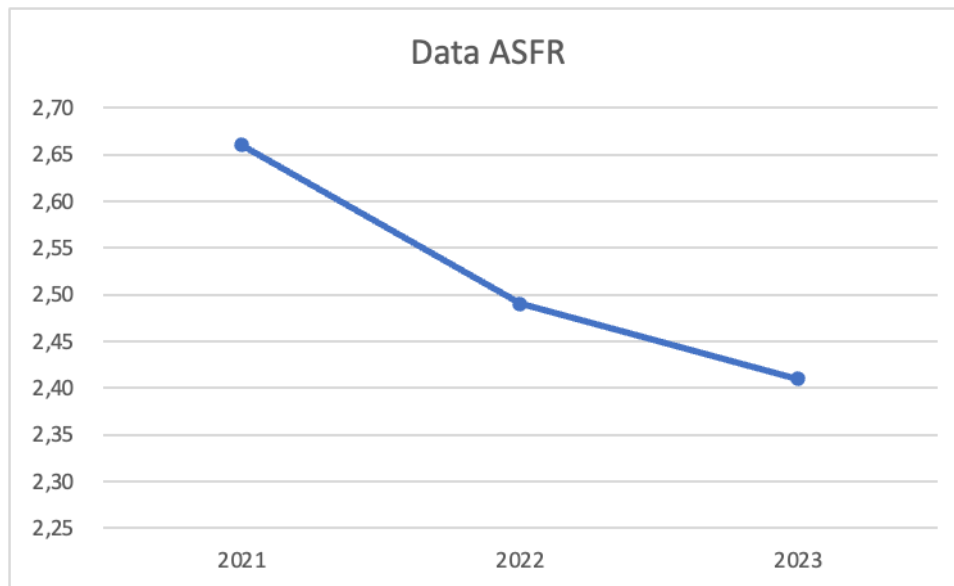
Sumber : SiPERINDU BKKBN

Dapat dilihat pada grafik Unmeet Need Provinsi Maluku Utara sampai pada tahun 2024 terdapat 13 persen ini artinya bahwa kesadaran pada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi di Maluku Utara sudah sangat tinggi, sehingga jarak lahir anak bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Maluku Utara dikatakan berhasil dalam program Keluarga Berencana(KB), karena ini menunjukkan semakin banyak perempuan yang kebutuhan kontrasepsinya terpenuhi, hal-hal yang mendukung keberhasilan ini dilihat dari berbagai aspek seperti peningkatan akses layanan, pemahaman masyarakat, dan dukungan program yang berkelanjutan.

ASFR (Age-Specific Fertility Rate) adalah **Angka Kelahiran Spesifik Usia** yang digunakan untuk mengukur jumlah kelahiran per 1.000 wanita dalam kelompok usia tertentu dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. ASFR memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai distribusi kelahiran berdasarkan kelompok usia wanita, dan sangat berguna dalam analisis demografi dan perencanaan keluarga.

ASFR adalah alat yang sangat berguna untuk memahami pola kelahiran di kalangan wanita berdasarkan usia, yang pada gilirannya membantu dalam perencanaan kebijakan populasi dan program kesehatan reproduksi. Dengan mengetahui ASFR, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi masalah terkait fertilitas dan perkembangan demografi dalam suatu negara. Data ASFR dapat dilihat dari grafik berikut :

**Grafik II.5. Data ASFR
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2023**



Sumber: siperindu BKKBN

Tabel Grafik AFSR Provinsi Maluku Utara dari tahun 2021 – 2023 menunjukkan penurunan angka kelahiran anak dari perempuan diusia tertentu. Maluku Utara dikatakan berhasil melakukan program keluarga berencana atau kebijakan demografi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk yang lebih stabil dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak tercapai.

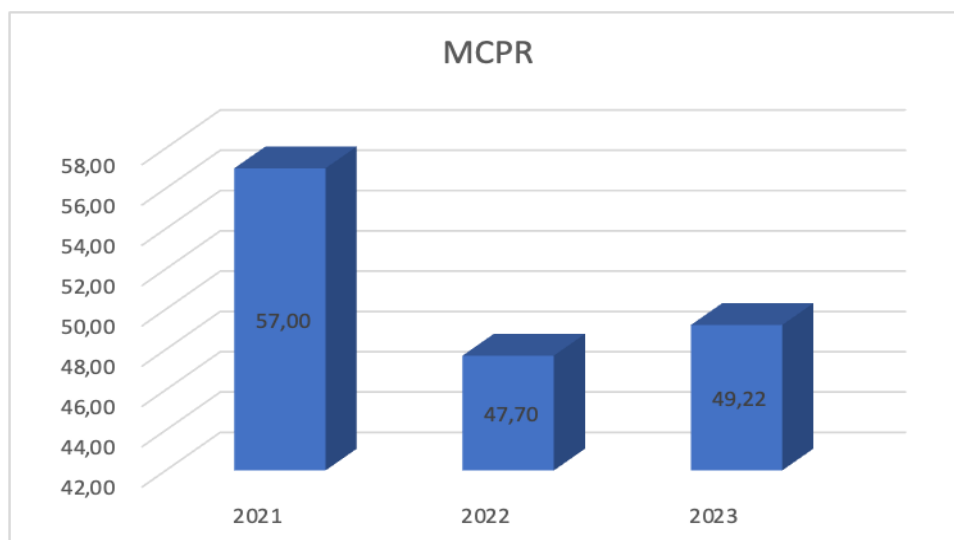
MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern, yang mengukur persentase pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern di suatu populasi dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. MCPR merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program keluarga berencana atau program pengendalian kelahiran dalam suatu negara atau wilayah.

MCPR merupakan indikator yang penting karena beberapa alasan:

1. **Evaluasi program keluarga berencana:** MCPR digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program keluarga berencana berhasil dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern. Semakin tinggi MCPR, semakin banyak pasangan yang mengakses kontrasepsi yang efektif dan aman.
2. **Peningkatan kesehatan ibu dan anak:** Penggunaan kontrasepsi modern dapat menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko komplikasi pada ibu dan anak.
3. **Pemberdayaan perempuan:** MCPR juga mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki kontrol terhadap kesehatan reproduksinya, termasuk kemampuan untuk merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran.
4. **Perencanaan pembangunan:** Data MCPR dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan terkait dengan pengendalian penduduk, layanan kesehatan, dan pendidikan.

MCPR adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai keberhasilan penggunaan kontrasepsi modern di suatu populasi. Angka MCPR yang tinggi menunjukkan bahwa banyak pasangan usia subur yang memanfaatkan metode kontrasepsi yang efektif dan aman, yang berdampak positif pada kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Data MCPR ditunjukkan dalam grafik berikut :

**Grafik II.6. Data MCPR
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2023**



Sumber: siperindu BKKBN

II.3.3. Kinerja Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan perlu menjadi perhatian bersama, sangat mendesak, dan harus segera ditangani oleh semua pihak. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual.

Kebutuhan pada data yang lengkap, akurat dan akuntabel sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan bagi korban kekerasan. Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir dan digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia. SIMFONI PPA merupakan sebuah upaya untuk menyediakan berbagai data dan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan Kasus kekerasan terhadap anak (KtA) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Di dalam KDRT, kasus inses adalah bentuk kekerasan seksual yang paling dominan dan anak perempuan paling rentan menjadi korban. Kasus inses sering tidak terungkap dan sulit dilaporkan karena pelakunya adalah orang yang terdekat dengan korban. Perempuan juga semakin rentan mengalami kekerasan pada situasi darurat dan bencana. Selain itu, kekerasan pada pekerja migran perempuan juga masih terjadi mulai dari pemberangkatan, transit, dan pemulangan. Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih tinggi dengan modus yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya kasus kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Terdapat berbagai kasus KBGO dalam berbagai bentuk, antara lain pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal*

content), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen daring (*online recruitment*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara khusus memasukan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Untuk itu, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak asasi mereka, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 464 kasus dengan korban sebanyak 492 korban atau naik dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut hanya bersandar pada kasus yang dilaporkan, kenyataan di lapangan sangat mungkin lebih banyak dari itu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel II.22. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Dilaporkan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban				
		L	P	T	Status	Status
					Proses	Selesai
2020	85	11	76	87	87	0
2021	167	34	161	195	195	0
2022	236	40	218	258	258	0
2023	237	48	225	273	273	0
2024	274	56	239	295	247	48

Tabel II.23. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dilaporkan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban				
		L	P	T	Status	Status
					Proses	Selesai
2020	61	0	62	62	62	0
2021	111	0	111	111	111	0
2022	163	0	169	169	169	0
2023	174	0	184	184	184	0
2024	187	0	190	190	162	28

Sumber: Data SIMFONI PPA Tahun 2020 – 2024

Dalam penanganannya, semua laporan atas kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara dapat ditangani seluruhnya. Hal ini mengingat mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain: (1) Kekerasan Psikis seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan; (2) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata; dan (3) Kekerasan Seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan. (4) Eksploitasi (5) Trafiking dan (6) Penelantaran.

Perlindungan anak sangatlah penting. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Maluku Utara sangat Intensif melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak . Salah satunya melalui upaya penguatan kapasitas bagi Kader/Aktifis PATBM. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) ini merupakan sebuah gerakan dari kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Kader inilah yang menjadi ujung tombak yang dapat mendeteksi kasus kekerasan hingga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum kekerasan itu terjadi.

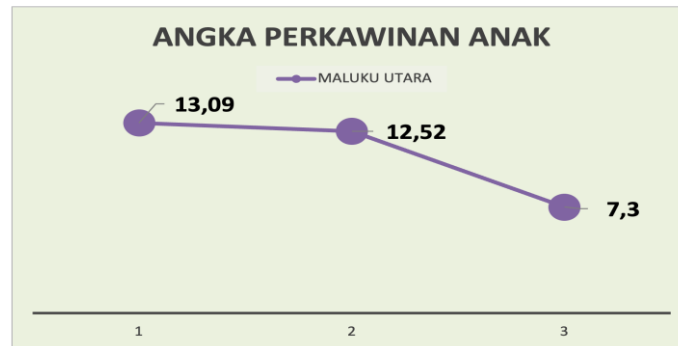
Data PATBM yang telah terbentuk di provinsi maluku utara
dapat dilihat dalam tabel di bawah :

JUMLAH PATBM YANG SUDAH TERBENTUK DI PROVINSI MALUKU UTARA				
No	Kab/Kota	Jumlah Kel/Desa PATBM	Jumlah Satgas PATBM	Jumlah SK Pembentukan
1	Halmahera Utara	7	70	7
2	Halmahera Barat	43	430	43
3	Ternate	411	4110	411
4	Pulau Morotai	24	240	24
5	Halmahera Selatan	4	40	4
6	Halmahera Timur	8	80	8
7	Tidore Kepulauan	5	50	5
8	Halmahera Tengah	-	-	-
9	Kepulauan Sula	-	-	-
10	Pulau Taliabu	-	-	-
JUMLAH		501	5010	501

Pada tanggal 25 September 2020 Pulau Maitara telah dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak. Penganangan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi.

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Maluku Utara, memiliki layanan berbasis website dengan nama www.ceriacare.com, yang memberikan layanan konsultasi secara online, berupa Konsultasi Psikologi, Konsultasi IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Konsultasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Konsultasi Hukum (Bantuan atau layanan pendampingan hukum). Temukan informasi dan edukasi untuk keluarga tercinta. Mari Rajut Masa Depan Keluargamu bersama Ceria Care.

Trend Persentase Perempuan usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun (Perkawinan anak, 2021-2023)



- Angka perkawinan anak terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023.
- Angka perkawinan anak maluku utara menurun signifikan sebesar 7,3 menurun 5,2% dari angka sebelumnya 12,52
- Namun begitu, tetap harus diusahakan untuk dapat trun dari angka rata2 nasional yaitu 6,92.

II.3.4. Kinerja Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, karena itu, hak-hak anak perlu dipenuhi untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah serta pemerintah daerah juga berperan dalam memnuhi hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur.

Menurut Undang-undang no.23 Tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Total jumlah anak di Provinsi Maluku Utara adalah 493.557, terdiri dari Perempuan 234.798 dan laki-laki sebanyak 258.759.

Pemenuhan hak anak mencakup upaya pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak

identitas, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan dokumen akta kelahiran. Capaian pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dapat ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang meliputi 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Komponen dari 24 indikator KLA adalah Peraturan Perundang-undangan Daerah, Anggaran, Upaya yang dilakukan oleh penanggungjawab Indikator, SDM terlatih KHA, Peran serta Forum/kelompok Anak (Pelopor dan Pelapor), Peran serta Mitra OPD lainnya, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa serta Inovasi (Model, Model, Teknologi).

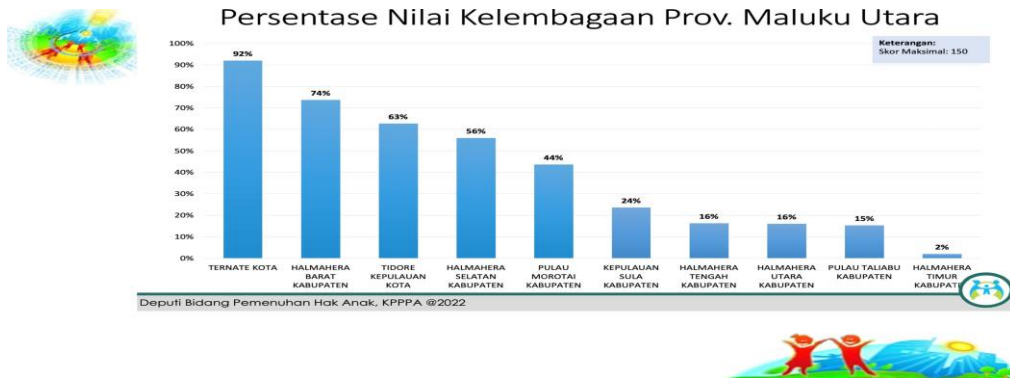
Sampai dengan tahun 2024 baru 3 (Tiga) kabupaten/kota atau 30 persen dengan status KLA, yakni Kota Ternate dengan predikat Nindya, Kota Tidore Kepulauan dengan predikat Pratamana dan Kabupaten Halmahera Barat dengan predikat Pratama. Dengan demikian sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara belum memenuhi capaian status KLA, sehingga perlu didorong untuk secara nyata melaksanakan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak sebagai upaya penyiapan generasi penerus bangsa ke depan.

Bidang Pemenuhan Hak-hak Anak menyelenggarakan kebijakan dalam (Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

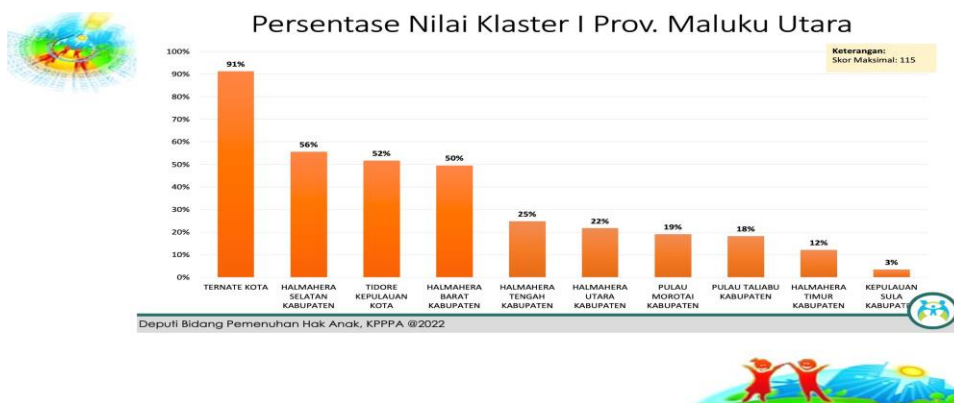
peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota); untuk mempercepat implementasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak melakukan pembinaan, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tahun 2020-2024 antara lain:

No	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penguatan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Halbar	Pendampingan Evaluasi Penilaian KLA Oleh KPPPA di Dapoer Sorasa Ternate	Rakor KLA di Grand Majang Hotel Ternate	Rakor KLA di Sahid Bela Hotel Ternate	Penguatan KLA di Kab. Halsei, Halbar, Halut dan Pulau Morotai
2		Perayaan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan secara Daring di Sofifi Bimtek KHA di Marahain Park Hotel, Kab. Halut	Perayaan Hari Anak Daerah (mewarnai) di Royal Resto Ternate	Monev KLA di Kab. Halsei, Halut, Tidore dan Halbar Rakor Forum Anak di Grand Majang Hotel Ternate	Pelaksanaan Kegiatan Festival Anak di Sofifi
3			Kegiatan Pelaksanaan Hari Anak Nasional di Discovery Ancol di DKI Jakarta	Pelaksanaan Hari Anak Daerah di Ternate	Bimtek Peningkatan Kapasitas Forum Anak di Jakarta
4			Pelaksanaan Hari Anak Internasional di Provinsi Sulawesi Utara	Perayaan Hari Anak Nasional di Semarang Jawa Tengah	
5			Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Konvensi Hak Anak di Grand Majang Hotel Ternate		

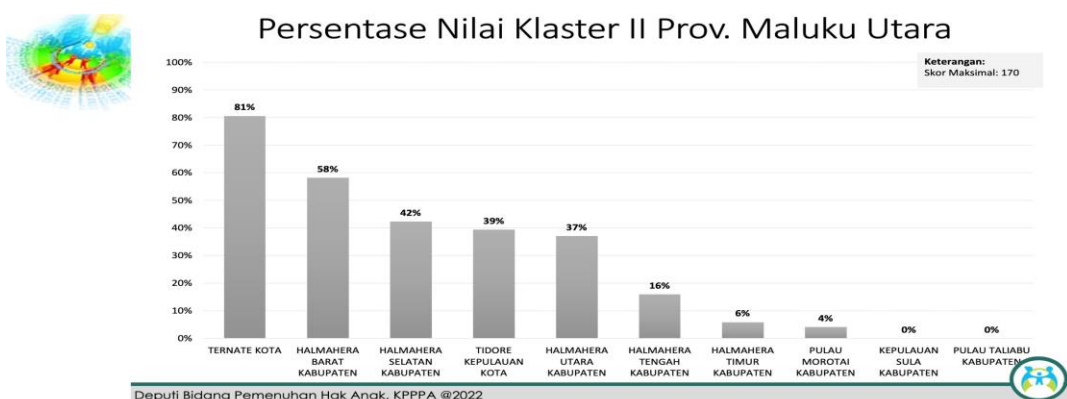
Capaian Kota Layak Anak Tahun 2022 Sebagai Berikut:



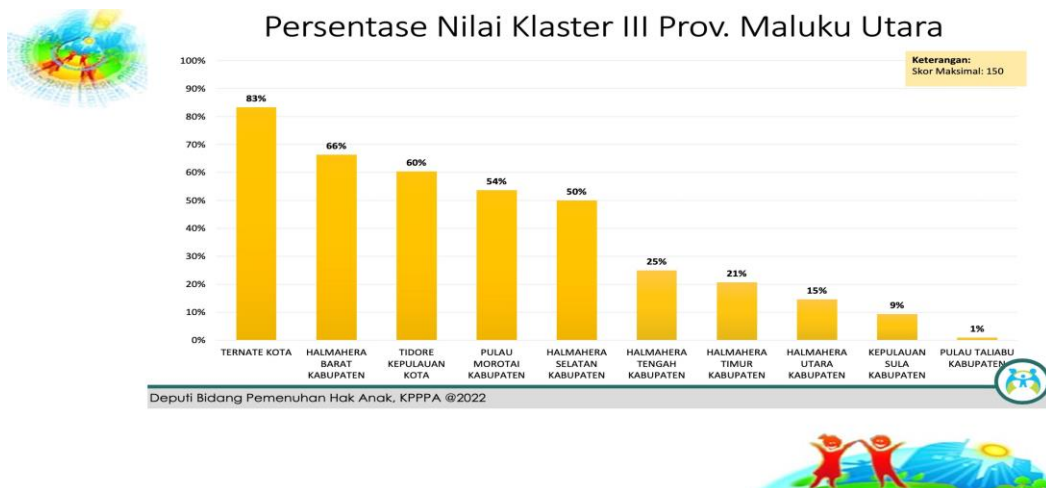
Klaster kelembagaan dengan tiga indikator yaitu Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak



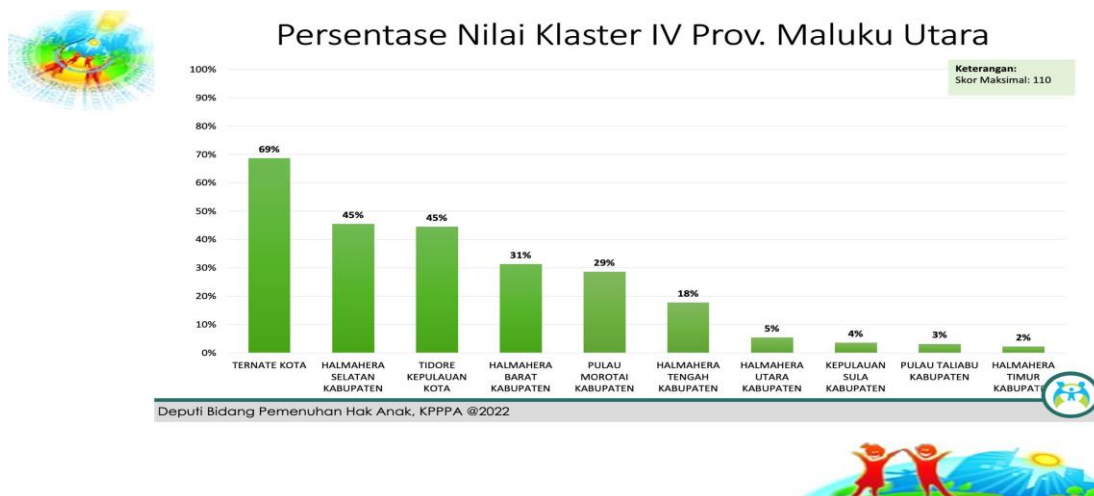
Persentase klaster 1, yaitu hak sipil dan kebebasan dengan angka tertinggi kota Ternate sesuai dengan indikator kepemilikan akta kelahiran, adanya pusat informasi layak anak, serta adanya partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor.



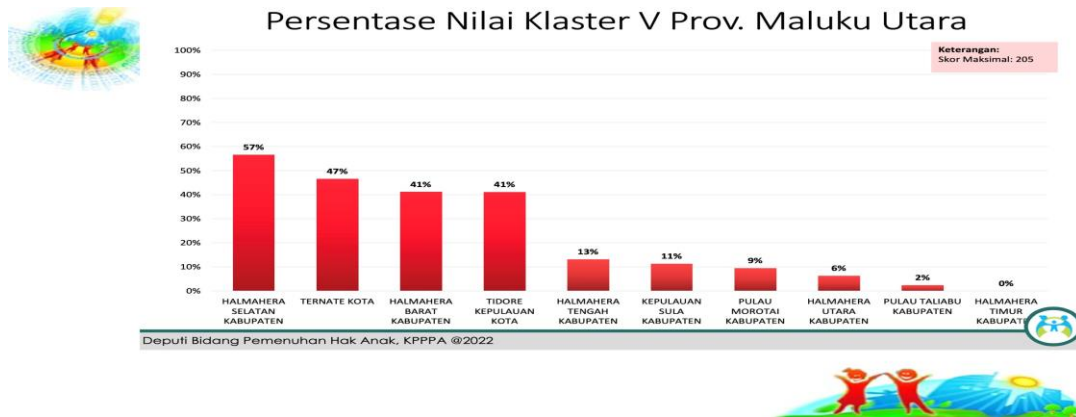
Klaster dua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Diklaster ini terdapat peningkatan Pencegahan Perkawinan Anak, Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara, Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.



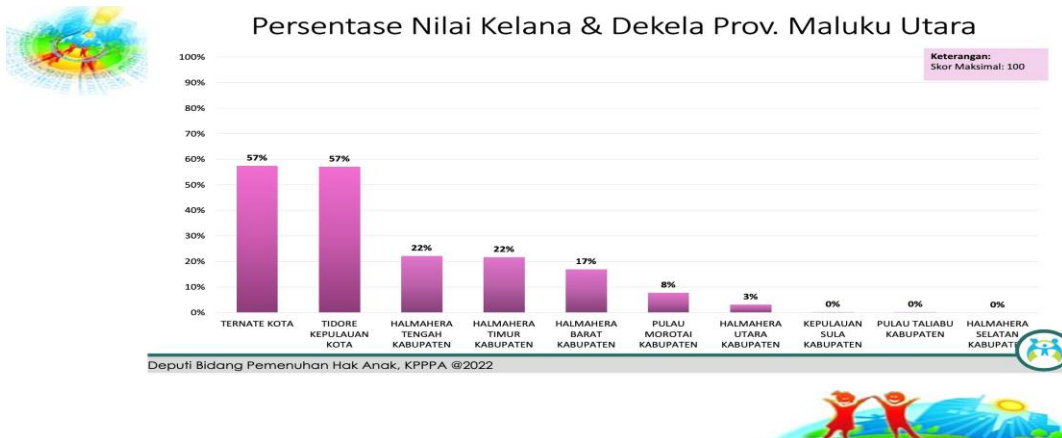
Klaster tiga yaitu klaster kesehatan dasar dan dan kesejahteraan yang mengukur Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Status Gizi Balita, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak), Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok.



Klaster 4 yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang mengukur tiga indikator penilaian yaitu Wajib Belajar 12 Tahun, Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA), Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.



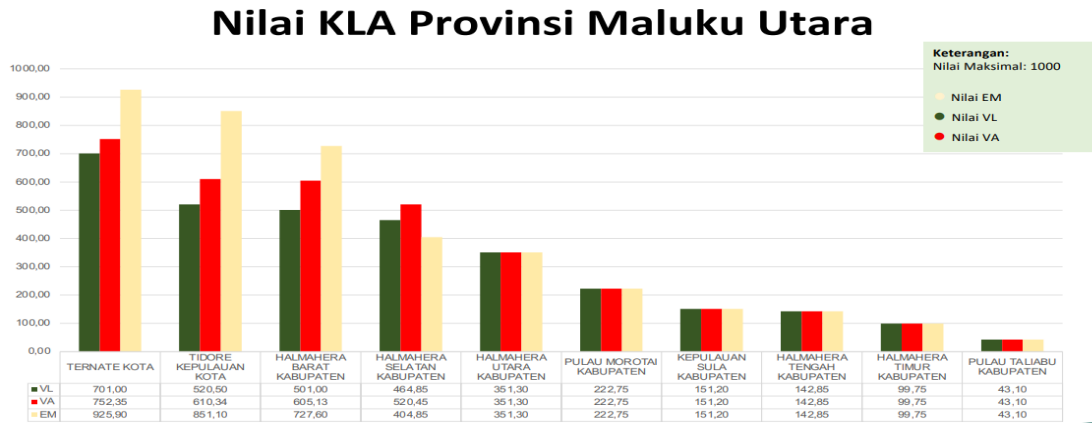
Klaster 5 yaitu klaster Perlindungan Khusus dengan 9 indikator penilaian yaitu Pencegahan dalam Perlindungan Khusus, Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitas, Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi, Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM), Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku), Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya



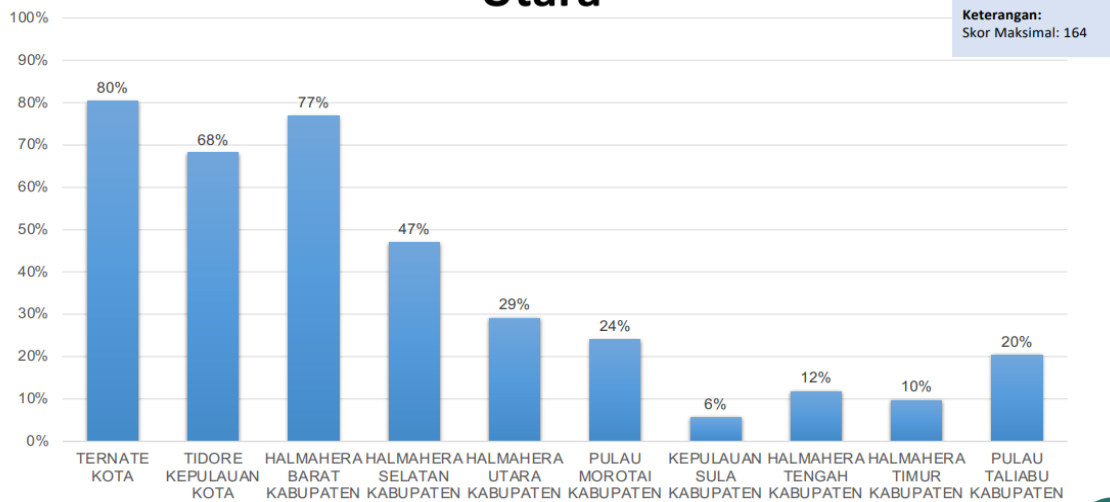
A. KLASER DEKELA KELANA

Klaster desa/kelurahan layak anak dan Kecamatan Layak Anak dengan dua Indikator yaitu Penyelenggaraan KLA di Kecamatan serta Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan.

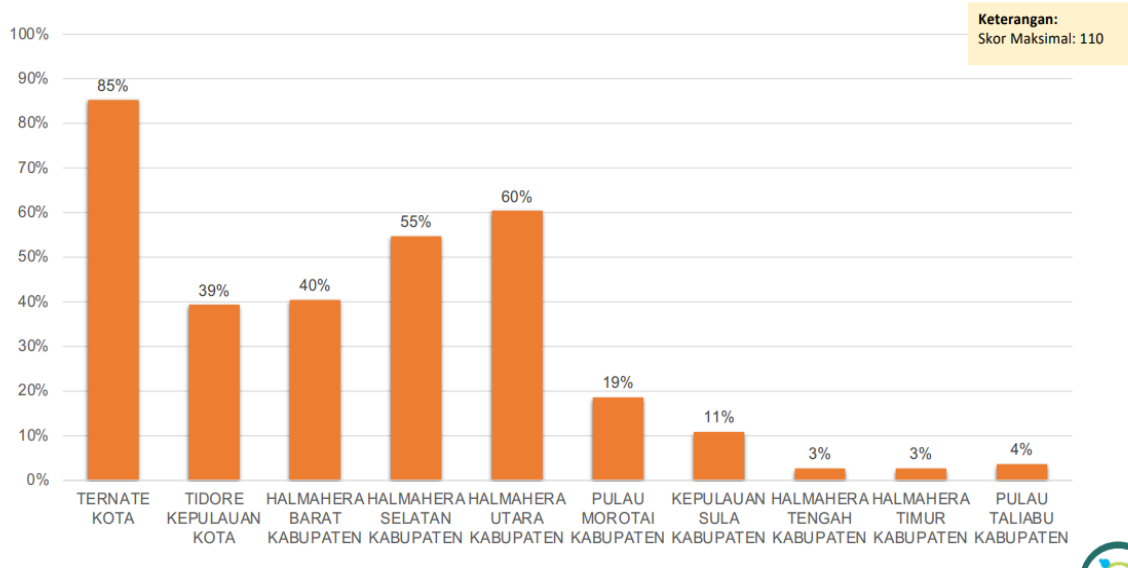
Capaian Kota Layak Anak Tahun 2023 yaitu:



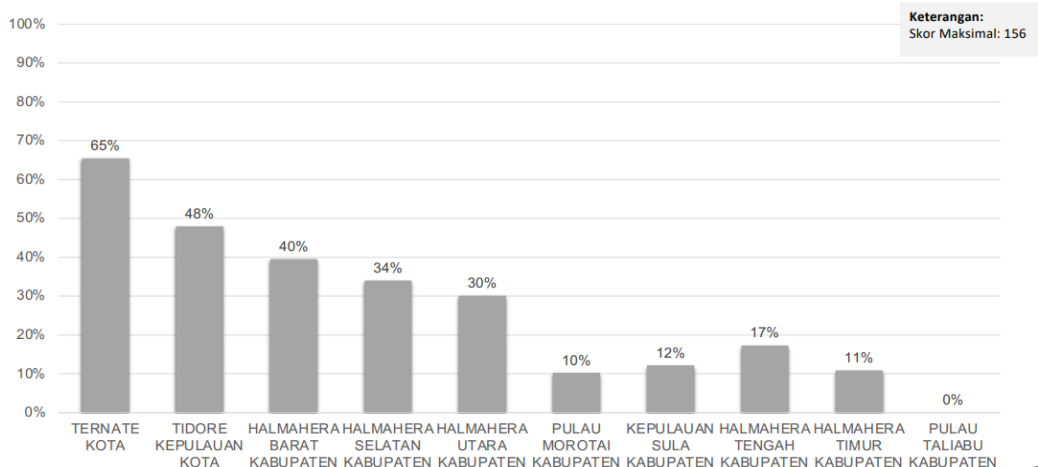
Persentase Nilai Kelembagaan Prov. Maluku Utara



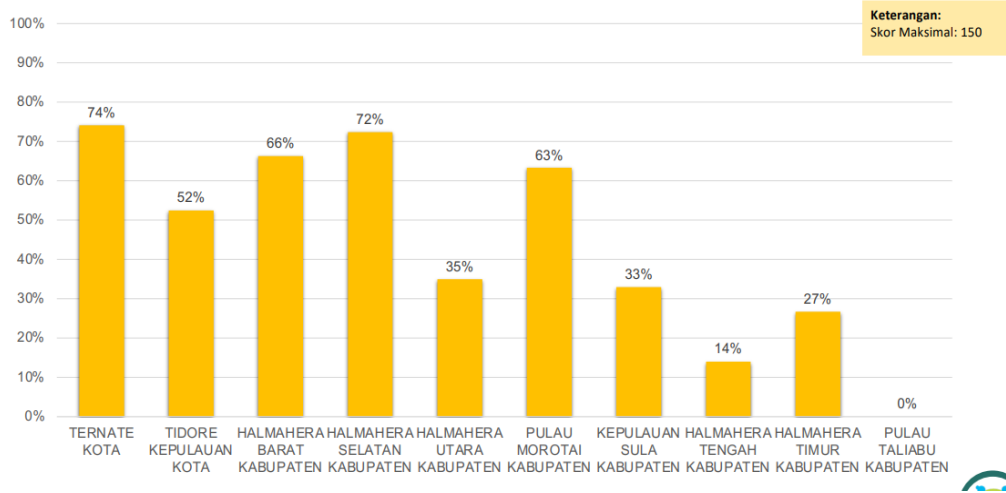
Persentase Nilai Klaster I Prov. Maluku Utara



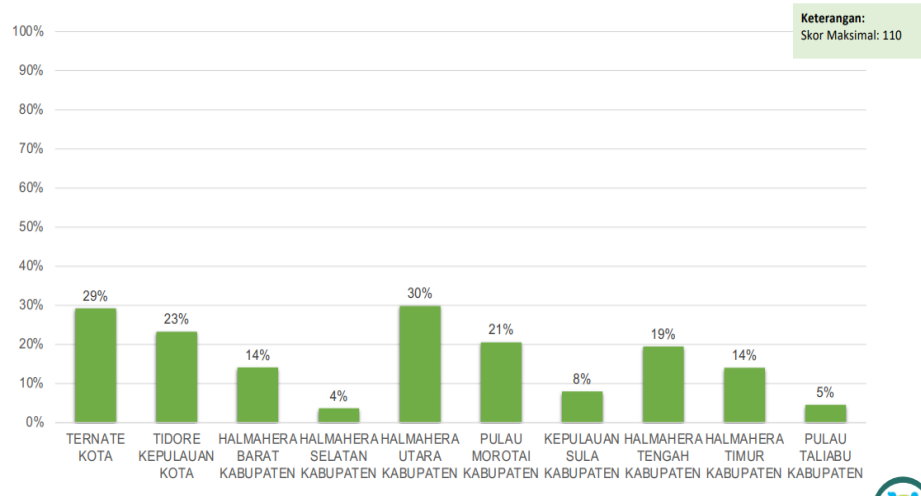
Persentase Nilai Klaster II Prov. Maluku Utara



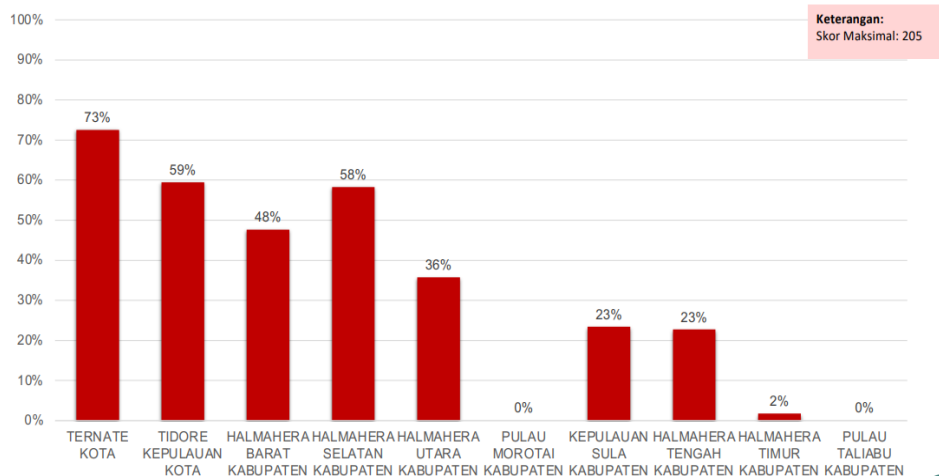
Persentase Nilai Klaster III Prov. Maluku Utara



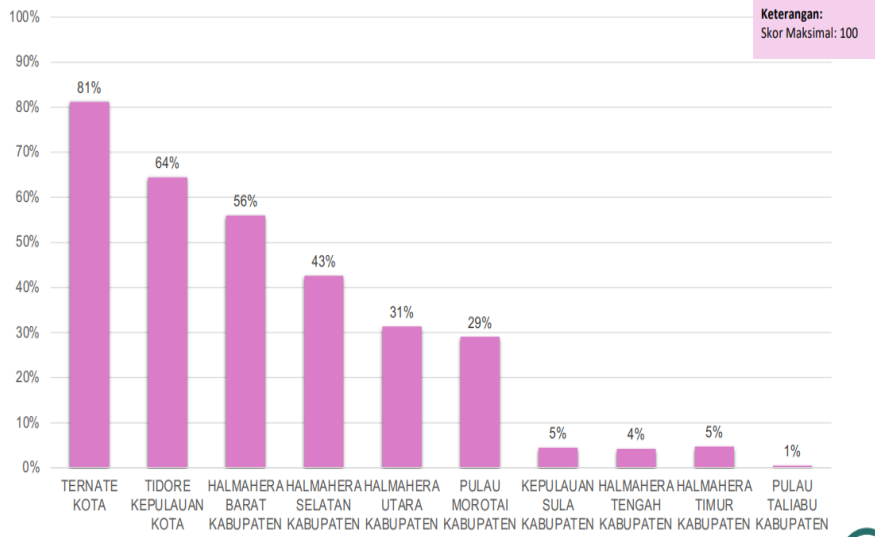
Persentase Nilai Klaster IV Prov. Maluku Utara



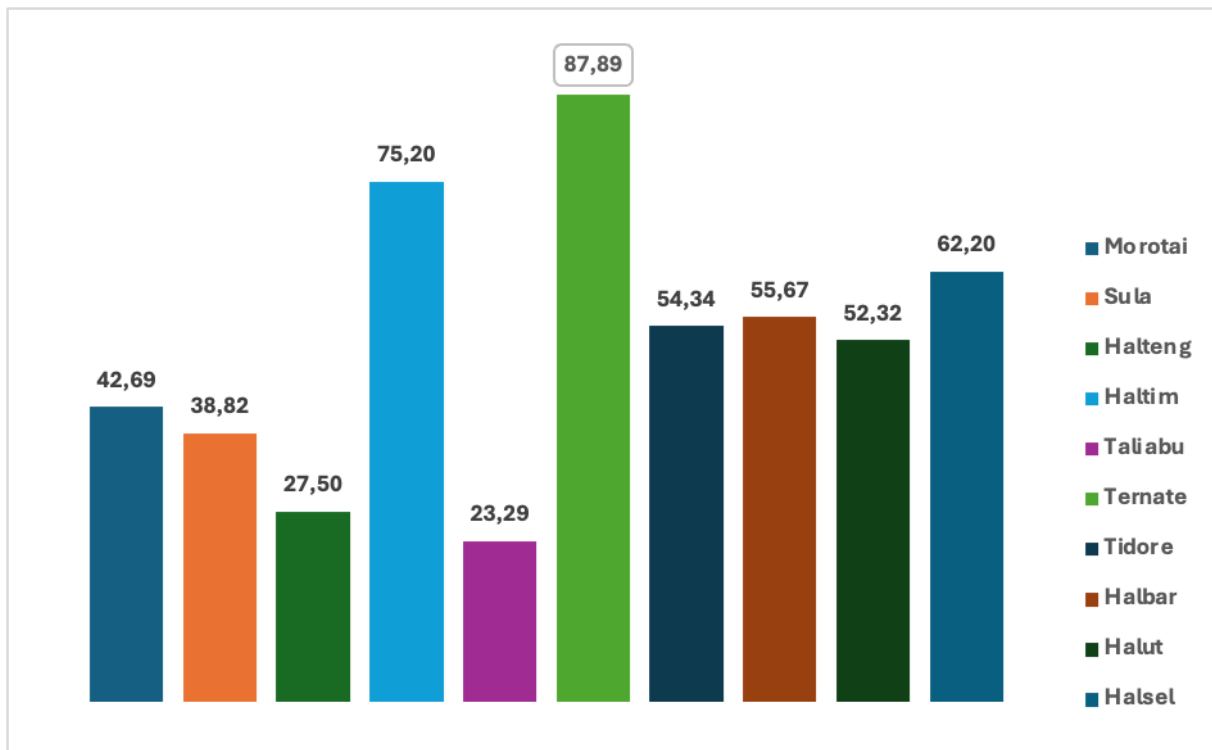
Persentase Nilai Klaster V Prov. Maluku Utara



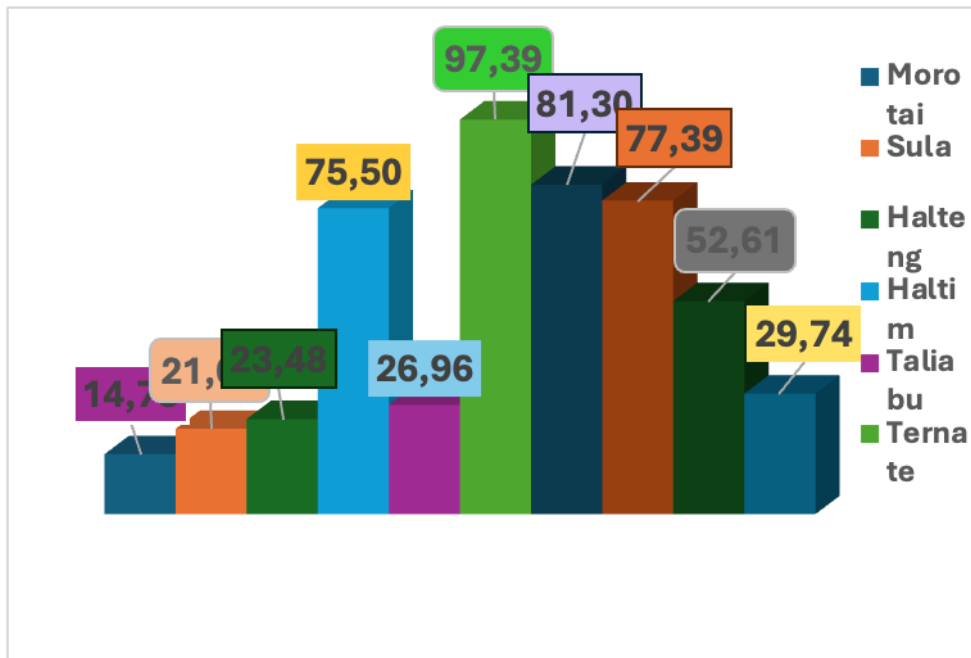
Persentase Nilai Kelana & Dekela Prov. Maluku Utara



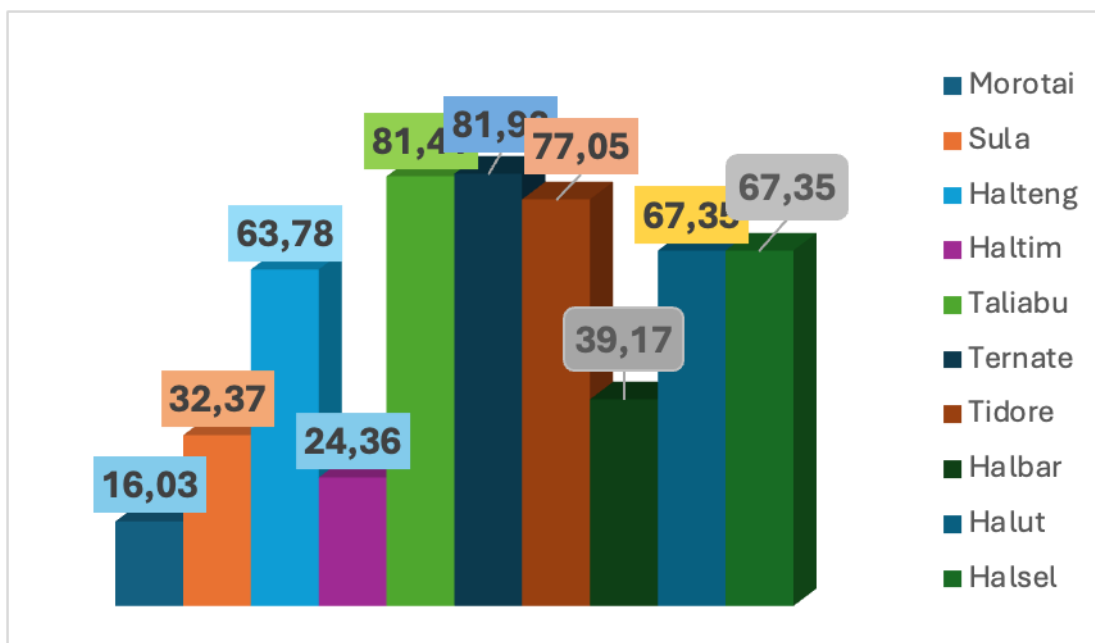
Capaian Kota Layak Anak tahun 2024



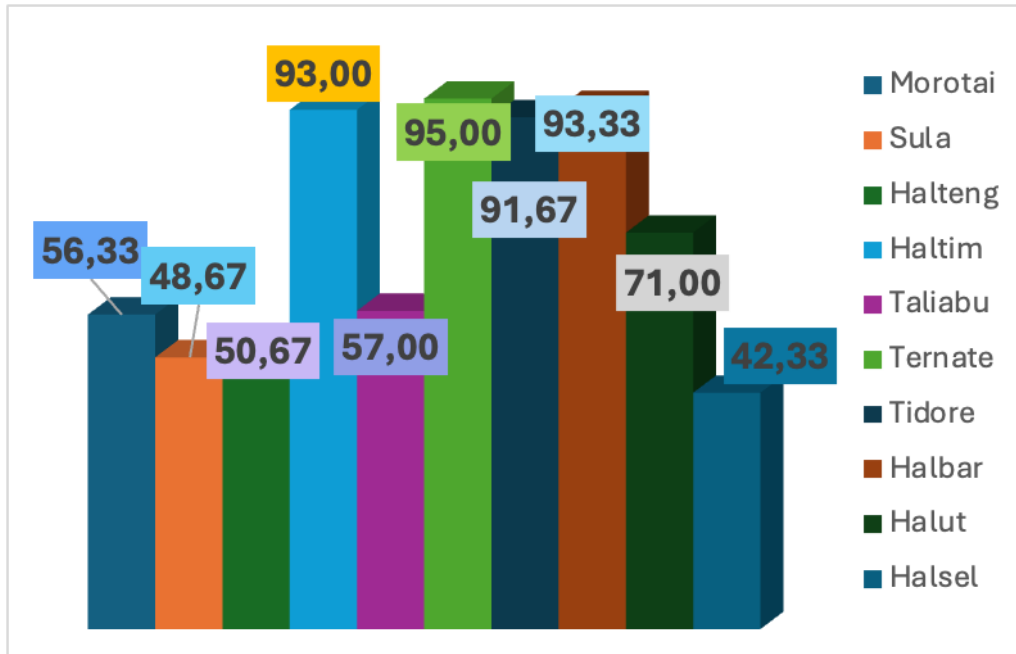
Persentase Nilai Klaster I, Prov. Maluku Tahun 2024



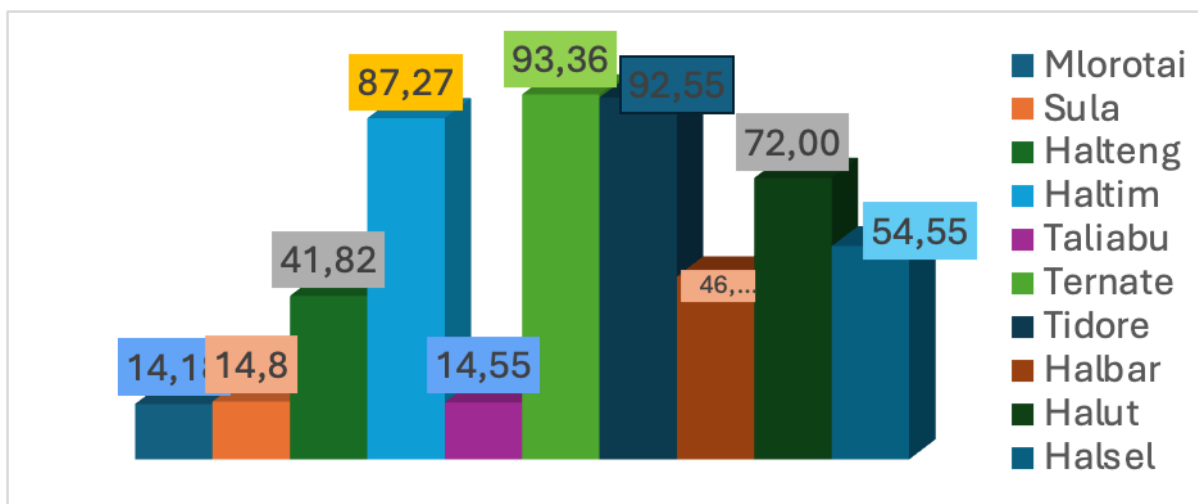
Persentase Nilai Klaster II, Prov. Maluku Tahun 2024



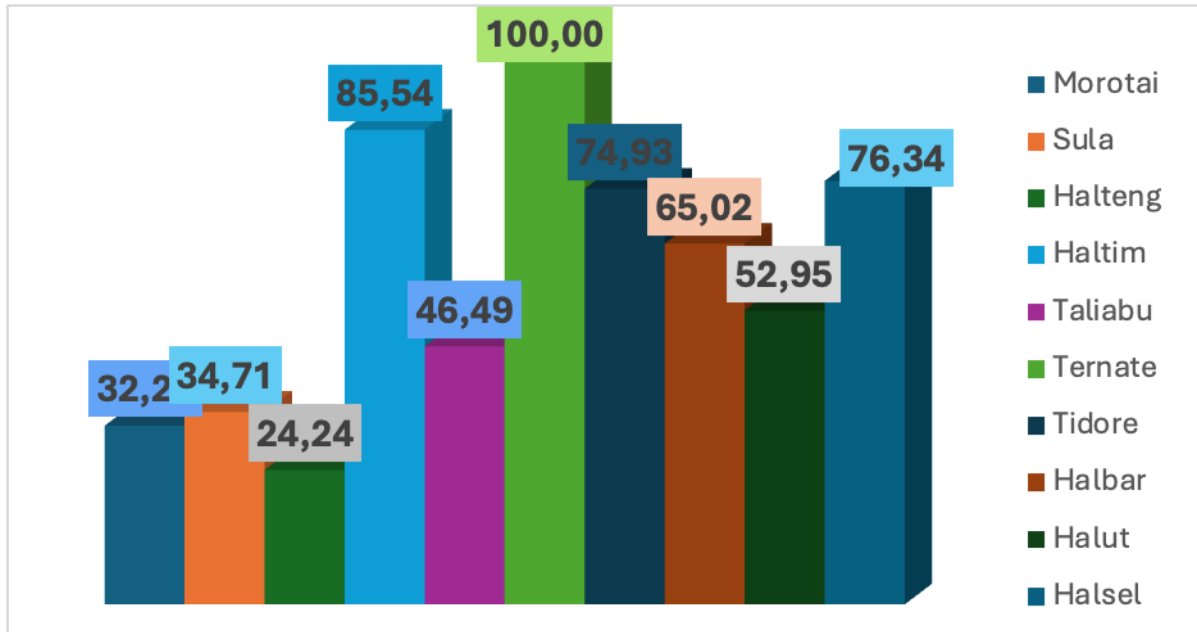
Persentase Nilai Klaster III, Prov. Maluku Tahun 2024



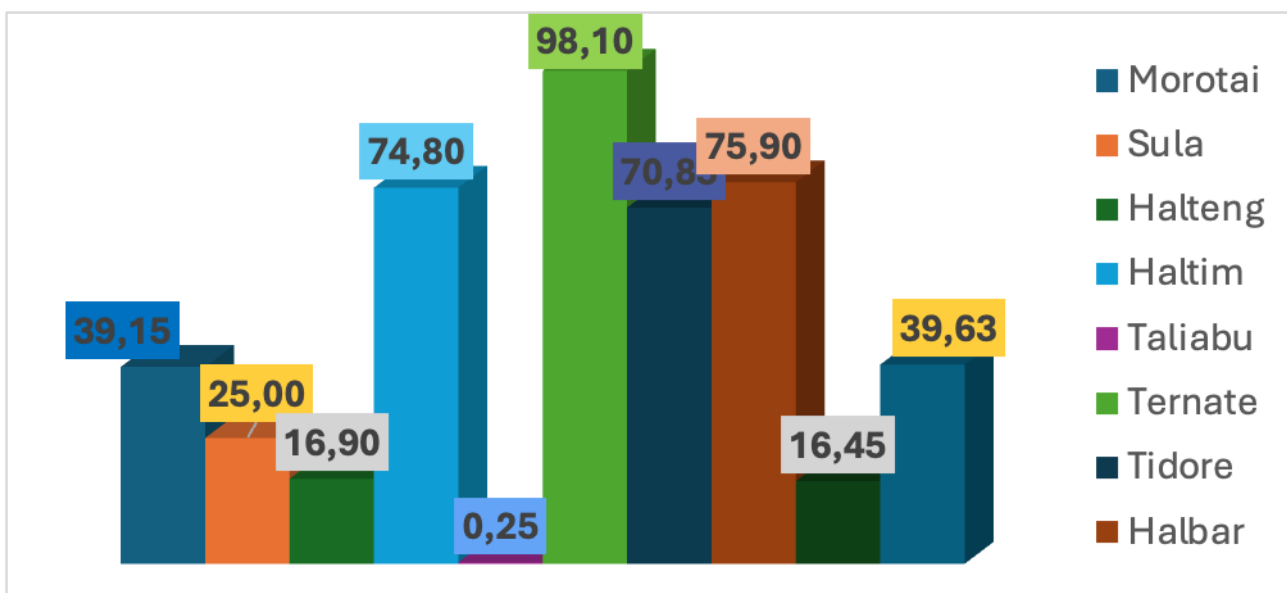
Persentase Nilai Klaster IV, Prov. Maluku Tahun 2024



Persentase Nilai Klaster V, Prov. Maluku Tahun 2024



Persentase Nilai Klaster Dekelana-Kelana, Prov. Maluku Tahun 2024



DATA FORUM ANAK MALUKU UTARA YAITU

JUMLAH FORUM ANAK KABUPATEN KOTA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023					
KAB/KOTA	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	JUMLAH
KOTA TERNATE	1	8		47	56
KOTA TIDORE KEPULAUAN	1	5	20	39	65
KAB. HALMAHERA BARAT	1	3	42		46
KAB. HALMAHERA SELATAN	1	5	-	-	6
KAB. HALMAHERA UTARA	1	-	-	-	1
KAB PULAU MOROTAI	1	5	3	-	9
KAB SULA	1	-	2	-	3
KAB HALMAHERA TENGAH	1	3	10	-	14
KABUPATEN HALMAHERA TIM	1	1	14	-	16
KAB. PULAU TALIABU	1	-	-	-	1

JUMLAH FORUM ANAK KABUPATEN KOTA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024					
KAB/KOTA	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	JUMLAH
KOTA TERNATE	1	8		47	56
KOTA TIDORE KEPULAUAN	1	5	20	39	65
KAB. HALMAHERA BARAT	1	3	42		46
KAB. HALMAHERA SELATAN	1	5	-	-	6
KAB. HALMAHERA UTARA	1	-	-	-	1
KAB PULAU MOROTAI	1	5	3	-	9
KAB SULA	1	-	2	-	3
KAB HALMAHERA TENGAH	1	3	10	-	14
KABUPATEN HALMAHERA TIM	1	1	14	-	16
KAB. PULAU TALIABU	1	-	-	-	1

Prestasi Forum Anak Daerah Provinsi Maluku Utara

Tahun 2022

1. Melakukan deklarasi serentak stop kekerasan di 10 kabupaten kota
2. Penguatan Kapasitas dan Pembentukan Forum Anak Kab Halmahera Timur dan Halmahera Barat di dampingi langsung Oleh Forum Anak Provinsi Maluku Utara

Tahun 2023

1. Webinar dengan tema berdampak untuk masa depan melibatkan 100 peserta di 10 kabupaten Kota
2. Penyusunan serentak SAI di 10 kabupaten Kota
3. Mendapatkan Apresiasi dari KPPPA sebagai perwakilan Pulau Maluku

Table Data Puskesmas Ramah Anak tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah PRAP	Ket
1	Ternate	11	8	
2	Tidore	10	7	
3	Haltim	16	0	
4	Halmahera Barat	15	12	
5	Halmahera Selatan	32	3	
6	Halmahera Utara	19	12	
7	Halmahera Tengah	12	0	
8	Sula	13	1	
9	Morotai	13	7	
10	Taliabu	9	0	
Total		150	50	

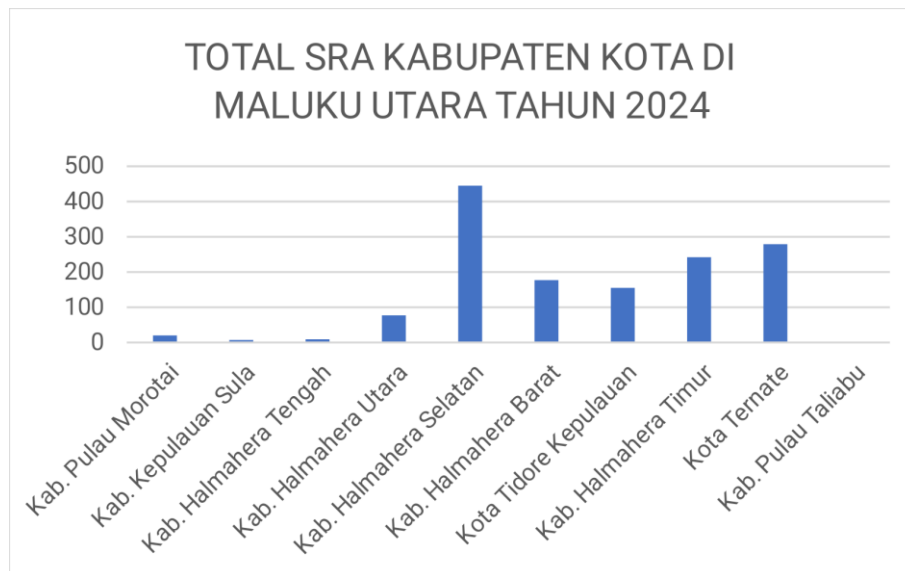
Sumber data DP3A Kabupaten Kota

Table data Puskesmas Ramah Anak tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah PRAP	Ket
1	Ternate	11	8	
2	Tidore	10	7	
3	Haltim	16	16	
4	Halmahera Barat	15	12	
5	Halmahera Selatan	32	3	
6	Halmahera Utara	19	12	
7	Halmahera Tengah	12	3	
8	Sula	13	1	
9	Morotai	13	7	
10	Taliabu	9	0	
Total		150	69	

Sumber data DP3A Kabupaten Kota

Tabel data SRA Kabupaten Kota Di Maluku Utara Tahun 2024 dalam diagram dan tabel



Tabel data Sekolah Ramah Anak Tahun 2024

DATA SRA KABUPATEN KOTA DI MALUKU UTARA TAHUN 2024		
NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL SRA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN
1	Kab. Pulau Morotai	20
2	Kab. Kepulauan Sula	7
3	Kab. Halmahera Tengah	9
4	Kab. Halmahera Utara	77
5	Kab. Halmahera Selatan	445
6	Kab. Halmahera Barat	177
7	Kota Tidore Kepulauan	155
8	Kab. Halmahera Timur	242
9	Kota Ternate	279
10	Kab. Pulau Taliabu	0
TOTAL		1411

Tabel dan diagram di atas menunjukkan telah terbentuk 1411 Sekolah Ramah Anak di semua jenjang pendidikan di sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara. Perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan angka nol dalam pembentukan SRA, dengan angka pembentukan SRA terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebanyak 445 SRA. Data di atas bersumber dari wesbite Kabupaten Kota Layak Anak Tahun 2024.

II.3.4. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

II.3.4.1. Data Pelayanan UPTD PPA

Sejak terbentuk pada akhir tahun 2020, perempuan dan anak korban kekerasan telah melakukan pengaduan kepada UPTD PPA baik secara langsung mendatangi UPTD, melalui media telekomunikasi maupun rujukan dari kab./kota maupun mitra layanan untuk mendapatkan layanan dari UPTD PPA, data layanannya sebagai berikut:

Data Layanan melalui UPTD PPA Tahun 2021

Kasus Terlayani	Jumlah Korban			Status Laporan Kasus		Jenis Layanan	Jumlah
	Anak	Perempuan Dewasa	Total korban	Rujukan	Langsung		
38	38	18	56	19	19	Pengaduan	20
						Psikologi	23
						hukum	17
						Mediasi	6
						Lainnya	7

Data jenis kekerasan yang dialami tahun 2021

Bentuk Kekerasan Yang Dialami							KDRT
Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
5	6	21	-	-	3	7	7

Pada tahun 2021, UPTD PPA Provinsi Maluku Utara menerima 38 penanganan kasus yang terdiri dari 19 kasus pengaduan langsung baik datang langsung maupun melalui media telekomunikasi dan 19 kasus rujukan dari berbagai kab./kota dengan kab. Terbanyak adalah Halmahera Utara sebanyak 6 rujukan, maupun mitra layanan lainnya seperti kepolisian maupun LSM. Adapun korban terbanyak adalah anak dengan jumlah 38 korban dengan jenis kekerasan terbanyak yang dialami korban adalah kekerasan seksual. Jenis layanan yang diberikan terbanyak adalah layanan psikologi sebanyak 23 layanan, baik layanan pendampingan psikologi maupun pemeriksaan psikologi klinis oleh ahli.

Data Layanan melalui UPTD PPA Tahun 2022

Kasus Terlayani	Jumlah Korban			Status Laporan Kasus		Jenis Layanan	Jumlah
	Anak	Perempuan Dewasa	Total Korban	Rujukan	Langsung		
69	41	28	69	37	32	Pengaduan	32
						Psikologi	32
						hukum	18
						Rumah Aman	7
						Penjangkauan	3
						Mediasi	-
Lainnya	3						

Data Jenis Kekerasan yang dialami tahun 2022

Bentuk Kekerasan Yang Dialami							KDRT
Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
4	4	36	-	-	-	2	23

Pada tahun 2022, UPTD PPA Provinsi Maluku Utara menangani 69 kasus yang terdiri dari 32 kasus pengaduan langsung baik datang langsung maupun melalui media telekomunikasi hotline yang disediakan dan 37 kasus rujukan dari berbagai kab./kota maupun mitra layanan lainnya seperti kepolisian maupun LSM. Adapun korban terbanyak adalah anak dengan jumlah 41 korban dengan jenis kekerasan

terbanyak yang dialami perempuan dan anak adalah kekerasan seksual. Jenis layanan yang diberikan terbanyak adalah layanan psikologi dan pengaduan sebanyak 32 layanan.

Data Layanan melalui UPTD PPA Tahun 2023

Kasus Terlayani	Jumlah Korban			Status Laporan Kasus		Jenis Layanan	Jumlah
	Anak	Perempuan Dewasa	Total korban	Rujukan	Langsung		
47	33	20	53	28	19	Pengaduan	47
						Psikologi	26
						hukum	7
						Rumah Aman	8
						Penjangkauan	4
						Mediasi	3
Lainnya	6						

Data Jenis Kekerasan yang dialami tahun 2023

Bentuk Kekerasan Yang Dialami							KDRT
Fisik	Psikis	Seksual	Eksploras	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
5	-	28	-	5	-	1	8

Pada tahun 2023, UPTD PPA Provinsi Maluku Utara menangani 47 kasus yang terdiri dari 19 kasus pengaduan langsung dan 28 kasus rujukan dari berbagai kab./kota maupun mitra layanan lainnya. Adapun korban terbanyak adalah anak dengan jumlah 33 korban dengan jenis kekerasan terbanyak yang dialami perempuan dan anak korban adalah kekerasan seksual. Jenis layanan yang diberikan terbanyak adalah layanan pengaduan dan layanan psikologi sebanyak 26 layanan, baik layanan pendampingan psikologi maupun pemeriksaan psikologi klinis oleh ahli.

Data Layanan melalui UPTD PPA Tahun 2024

Kasus Terlayani	Jumlah Korban			Status Laporan Kasus		Jenis Layanan	Jumlah
	Anak	Perempuan Dewasa	Total Korban	Rujukan	Langsung		
32	20	13	33	17	15	Pengaduan	32
						Psikologi	21
						hukum	6
						Rumah Aman	-
						Penjangkauan	1
						Mediasi	1
Lainnya	4						

Data Jenis Kekerasan yang dialami tahun 2024

Bentuk Kekerasan Yang Dialami							KDRT
Fisik	Psikis	Seksual	Eksploras	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
2	2	15	-	-	4	1	7

Pada tahun 2024, UPTD PPA Provinsi Maluku Utara menangani 32 kasus yang terdiri dari 15 kasus pengaduan langsung baik datang langsung maupun melalui media telekomunikasi hotline yang disediakan dan 17 kasus rujukan dari berbagai kab./kota maupun mitra layanan lainnya seperti kepolisian maupun LSM. Adapun korban terbanyak adalah anak dengan jumlah 20 korban dengan jenis kekerasan terbanyak yang dialami perempuan dewasa sebanyak 7 kasus KDRT 2 kasus kekerasan seksual. Pada anak adalah yang paling banyak kasus adalah kekerasan seksual sebanyak 13 kasus. Jenis layanan yang diberikan terbanyak adalah layanan psikologi dan pengaduan sebanyak 33 layanan.

Data Layanan melalui UPTD PPA Tahun 2025 per Bulan Agustus

Kasus Terlayani	Jumlah Korban			Status Laporan Kasus		Jenis Layanan	Jumlah
	Anak	Perempuan Dewasa	Total Korban	Rujukan	Langsung		
18	12	6	17	7	11	Pengaduan	11
						Psikologi	6
						Hukum	2
						Rumah Aman	1
						Penjangkauan	3
						Mediasi	2
						Lainnya	4

Data Jenis Kekerasan yang dialami tahun 2025 per Bulan Agustus

Bentuk Kekerasan Yang Dialami							KDRT
Fisik	Psikis	Seksual	Eksploras	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
3		8	-	-	5		2

Pada tahun 2025 per bulan Agustus, UPTD PPA Provinsi Maluku Utara menangani 18 kasus yang terdiri dari 11 kasus pengaduan langsung baik datang langsung maupun melalui media telekomunikasi hotline yang disediakan dan 7 kasus rujukan dari berbagai kab./kota maupun mitra layanan lainnya seperti kepolisian maupun LSM. Adapun korban terbanyak adalah anak dengan jumlah 12 korban. dengan jenis kekerasan terbanyak yang dialami anak sebanyak 8 kasus kekerasan seksual. Jenis layanan yang diberikan terbanyak adalah layanan psikologi dan pengaduan sebanyak 18 layanan.

I.5. Kelompok Sasaran Layanan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara memiliki sasaran layanan kepada masyarakat terutama Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, serta memastikan Pemenuhan Hak-hak Anak di Provinsi Maluku Utara.

I.6. Permasalahan dan Isu Strategis

I.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia Aparatur yang berkapasitas unggul;
- 2) Kurangnya dukungan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- 3) Kurangnya koordinasi antara sekretariat dan bidang teknis;

b. Permasalahan terkait Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, data dan Informasi

- 1) Lemahnya Komitmen dari OPD Driver di Luar dari DPP-PA
- 2) Kurangnya Komitmen dari Pimpinan OPD terkait PPRG
- 3) Kurangnya pemahaman PPRG dari para pengambil kebijakan
- 4) Tingginya Ego Sektoral dari OPD
- 5) Terbatasnya SDM yang memahami PPRG
- 6) Kurangnya kepercayaan partai terhadap perempuan
- 7) Kurangnya inovasi dan edukasi yang dimiliki oleh pengrajin perempuan
- 8) Belum optimalnya kelembagaan PUG

c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 2) kurangnya sosialisasi tentang kekerasan sampai ketingkat masyarakat rendah
- 3) kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

- 4) kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari instansi terkait
- 5) kurangnya dukungan dana untuk menunjang pelayanan
- 6) belum maksimalnya pelayanan yang dipengaruhi kondisi geografis daerah
- 7) belum seluruhnya terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) di seluruh Kab/ Kota
- 8) rumitnya indentifikasi permasalahan yang dihadapi korban
- 9) terbatasnya fasilitas layanan
- 10) kurangnya SDM lembaga layanan yang terlatih
- 11) belum seluruhnya terbentuk PATMB di kab/kota.

d. Permasalahan terkait Pemenuhan Anak

- 1) Terdapat beberapa Kab/Kota yang belum memiliki Perda tentang KLA
- 2) Masih kurangnya SDM terlatih KHA, fasilitator, dll hampir disemua Kab/Kota
- 3) Kurangnya dukungan anggaran KLA
- 4) Masih kurangnya bahkan belum adanya sarana prasarana yang menjadi syarat instrumen penilaian KLA di Kab/Kota
- 5) SDM Penyelenggara/ Pemangku Kepentingan yang selalu berganti (dimutasi) sehingga berakibat pada kinerja pencapaian KLA yang mengalami hambatan.
- 6) Regulasi yang ada masih terbatas pada Peraturan Bupati/Walikota, baru beberapa kab/Kota yang sementara menyiapkan proses pengajuan Perda.
- 7) Masih belum optimalnya kinerja Gugus Tugas, baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota
- 8) Masih belum maksimalnya penyusunan RAD Kab/Kota
- 9) Belum maksimalnya kemitraan dengan LM, dunia usaha dan media massa di beberapa kab/kota
- 10) Belum maksimalnya kinerja Forum Anak Daerah Kab/Kota
- 11) Belum maksimalnya kemitraan dengan LM, dunia usaha dan media massa di beberapa kab/kota

- 12) Belum tersedianya data dari beberapa OPD yang mengakibatkan beberapa Kab/Kota kesulitan dalam menyiapkan data terkait Profil KLA di Kab/Kota dimaksud.
- 13) Organisasi kemasyarakatan, perseorangan, dunia usaha belum terlalu paham apa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan KLA
- 14) Terkendala jaringan internet yang berpotensi pada lambatnya penyampaian informasi
- 15) Terbatasnya pelatihan utk mendapatkan Sertifikasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan KLA
- 16) Sertifikasi SDM yang berlaku selama 2 Tahun saja dan masih kurangnya pelatihan yang menunjang pemenuhan sertifikasi tsb.

e. Permasalahan unit PP dan PA

1. Ketiadaan beberapa jenis tenaga layanan di UPTD PPA, seperti Psikolog Klinis, Peksos dan Konselor Hukum serta masih perlunya penguatan SDM yang ada;
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang UPTD PPA sebagai lembaga layanan dan cara mengaksesnya sehingga masih banyak kasus masuk melalui mitra layanan lainnya dan masih minimnya pengaduan yang masuk melalui media layanan UPTD yang disediakan;
3. Minimnya SDM layanan dan keahlian SDM layanan di kab./kota dan juga belum semua kab./kota membentuk UPTD PPA sebagai lembaga layanan;
4. Koordinasi dengan stakeholder terkait masih lemah dalam pemberian layanan dan pemenuhan hak korban, seperti reintegrasi sosial, pemenuhan hak atas pendidikan, penanganan ABH dan pemberdayaan ekonomi;
5. Keterbatasan anggaran menyebabkan pendampingan bagi korban rujukan dari kab./kota hanya dapat dilakukan sekali pendampingan, sedangkan baik proses hukum maupun proses pemulihan korban memerlukan waktu dan memerlukan pendampingan lebih dari sekali sehingga terkadang menyebabkan korban /keluarga mencabut laporan karena merasa tidak ada yang mendukung dan pemulihan korban tidak tuntas;

6. Kejadian/kasus yang tidak dapat diprediksi waktu dan jumlahnya tidak didukung dengan system ketersediaan dana/anggaran yang telah tersusun sesuai perencanaan dan waktunya.

Yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan:

1. Pengusulan perekrutan tenaga layanan sesuai kebutuhan layanan;
2. Sosialisasi yang masif melalui berbagai sarana maupun berbagai kesempatan terkait dengan UPTD PPA dan layanannya;
3. Mendorong Kab./kota yang belum membentuk UPTD PPA agar segera membentuk dan memberikan penguatan kepada SDM layanan terkait pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Penguatan jejaring layanan dengan stakeholder layanan lainnya.

1.6.2. Penentuan Isu-isu Strategis Pelayanan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan persoalan yang dihadapi Dinas P3A provinsi Maluku Utara beberapa tahun terakhir terdapat beberapa poin penting sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Banyaknya tugas kesekretariatan yang belum terselesai dengan baik dan tepat waktu
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan peran POKJA PUG
3. Belum Tercapainya Provinsi Layak Anak
4. Belum optimalnya Pelayanan Lintas Sektor untuk korban ktP dan ktA
5. Belum Terpenuhinya Hak-hak dan perlindungan perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Tabel 2.1 Teknis Penyusunan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber daya ManusiA	Kurangnya sumber daya manusia Aparatur yang berkapasitas unggul					Kualitas Sumber daya manusia yang berkualitas belum terpenuhi.
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Masih kurangnya komitmen Pokja PUG dalam menjalankan Anggaran Responsif Gender sehingga ARG belum menjadi prioritas atau komitmen utama dari OPD	Perlindungan perempuan dari kekerasan serta keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan belum maksimal. Ketimpangan gender masih terlihat dalam bidang pekerjaan dan kepemimpinan.	Peningkatan kerentanan terhadap bencana iklim, yang memperburuk dampak kekerasan berbasis gender, ancaman kesehatan ibu dan anak, serta kesulitan akses terhadap pendidikan dan sumber daya	Perubahan Iklim dan dampaknya pada perempuan dan anak	Perubahan iklim yang mengakibatkan kehilangan ruang hidup bagi perempuan dan anak	Kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mengakibatkan perempuan masih menghadapi diskriminasi .
Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA)	masih kurangnya Regulasi terkait Pemenuhan Hak Anak					masih minimnya pemenuhan hak-hak anak

Pengembangan Kapasitas Perempuan dan Anak	Kurangnya Layanan Tindak Lanjut ekonomi korban ktP dan ktA					
Perlindungan Perempuan dan Anak	meningkatnya Jumlah Angka ktP dan ktA yang dilaporkan					Peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas P3A Provinsi Maluku Utara

Tujuan dan Sasaran Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur Maluku Utara, Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara 2025-2029 sesuai Tugas dan Fungsinya berada pada Misi 1, Tujuan 1 dan Sasaran 4, lebih terperinci sebagaimana berikut ini.

Visi : Menjaga keberagaman dan pemerataan pembangunan bersama Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi 1. : Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing.

Tujuan 1. : Terwujudnya SDM berkualitas, unggul dan berdaya saing.

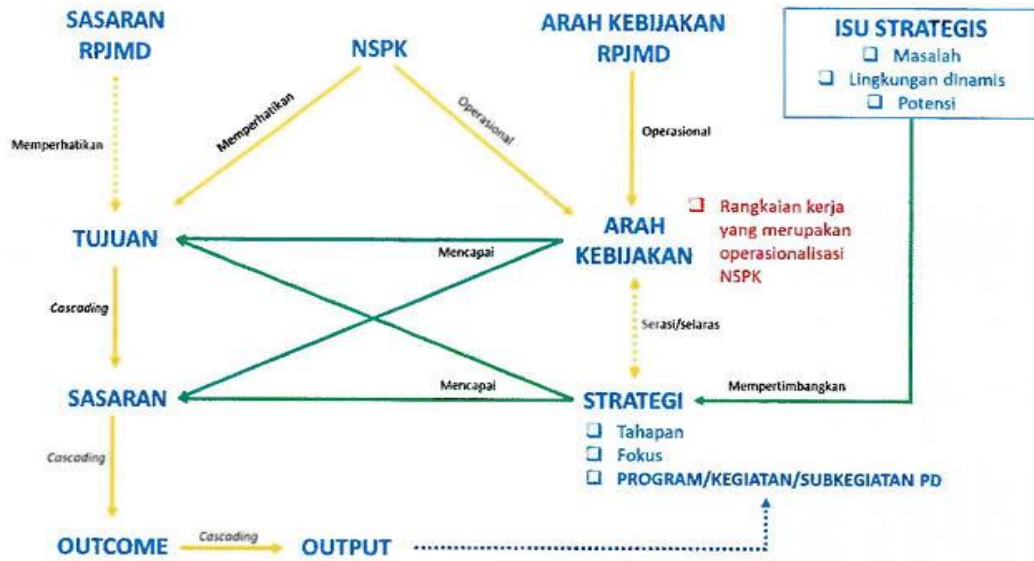
Indikator : Indeks Modal Manusia (IMM).

Sasaran 4. : Terwujudnya masyarakat inklusif dan peran pemuda dalam pembangunan.

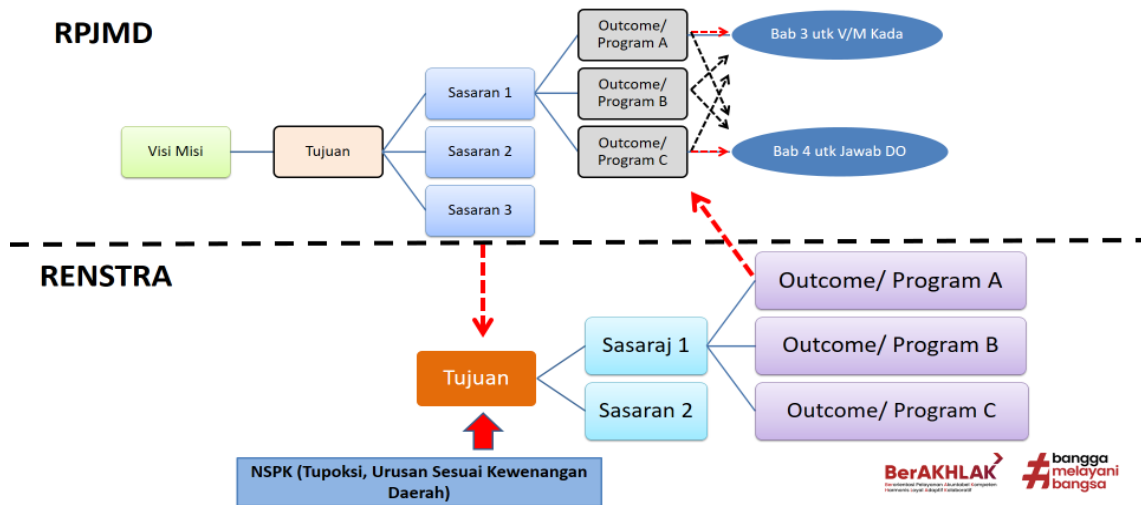
Indikator : Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di atas, maka keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Bertolak dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan beredoman dan gambar keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat daerah di atas, maka di rumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagaimana table teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
- Terwujudnya masyarakat inklusif dan peran pemuda dalam pembangunan	Mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang setara adil dan inklusif		Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	80.01	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00	
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan yang berprestektif Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55.41	56.48	57.20	58.48	58.68	60.00	60.50	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	63.42	67	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	
		Meningkatnya Pencegahan kekerasan perlindungan perempuan anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	29.14	27.60	26.07	24.53	23.00	21.47	19.92	
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak (%)	6.27	6.06	5.84	5.63	5.42	5.19	4.84	
		Meningkatnya Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	80	80	85	90	90	95	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	80	80	85	90	90	95	

	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (%)	30	40	40	50	60	70	80	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	65,65	71	72	73	74	75	76	

III. 2. Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara, diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Provinsi Maluku Utara dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan tahapan pembangunan atau strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Penahapan Rencana Strategis

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	5	6
<p>Fondasi Kapasitas & Regulasi Awal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk meningkatkan pelayanan perempuan dan anak berbasis gender ➤ Penyusunan regulasi tentang Perempuan dan Anak 	<p>Kelembagaan & Sosialisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya kelembagaan pelayanan perempuan dan anak sesuai standar; ➤ Penerapan regulasi perempuan dan anak; 	<p>Implementasi Terpadu & Pemberdayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementasi Program Perempuan dan anak kedalam pembangunan; 	<p>Penguatan Data & Ekspansi Layanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teridentifikasi data perempuan dan anak; ➤ peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak; ➤ peningkatan kesejahteraan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; 	<p>Evaluasi & Monitoring</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 adalah mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak, Ini juga termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak.

Fokus utama Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pemberdayaan Perempuan :
 - a. Meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan
 - b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang termasuk pemerintahan
 - c. Mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Perlindungan Anak :
 - a. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
 - b. Memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

Untuk lebih jelas dan terarah, berikut ini disajikan teknik dalam merumuskan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel.3.5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Peningkatan kualitas hidup perempuan	Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pembentukan Payung Hukum/ Regulasi tentang Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	Pengumpulan data dan informasi	Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan PUG, KLA 2. Peningkatan Unit layanan korban terpadu, 3. Peningkatan pemberdayaan perempuan 4. Provinsi Layak Anak 5. Pemutahiran dan Pemanfaatan data berbasis gender. 	
3		Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Peningkatan Keterlibatan Perempuan di parlemen dan manajerial	
4		Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan	Peningkatan Pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, sosial, politik dan hukum	

5	Perlindungan perempuan dan anak	Penguatan Resiliensi Anak, Perlindungan Anak dan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan perlakuan salah lainnya.	Penguatan Resiliensi Anak, Perlindungan Anak dan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan perlakuan salah lainnya.	
---	---------------------------------	--	--	--

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

IV.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Perincian program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan perarutan keputusan Menteri dalam negeri No. 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 untuk pelaksanaan tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

IV.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini berada di bawah tanggungjawab Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan, dengan Sub Kegiatan:
 - 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 3) Administrasi Umum, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- 39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Sub Kegiatan:
 - 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan
 - 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.1.2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga, Data & Informasi Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 - 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, dengan Sub Kegiatan:

- 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 03 Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi

IV.1.3. Program Perlindungan Perempuan

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi

IV.1.4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga, Data & Informasi Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 - 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak kewenangan provinsi, dengan Sub Kegiatan:

01 Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi

IV.1.5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga, Data & Informasi Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan:

01 Penyediaan Data Gender dan Anak

02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

IV.1.6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

1). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, dengan Sub Kegiatan:

01). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan

02). Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

03). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

04). Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan

05). Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

06). Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan

07). Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IV.1.7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 - 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

IV.1.8 Program Pengendalian Penduduk

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga, Data & Informasi Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

IV.1.9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- 1) Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelola Pelayan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

IV.1.7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga, Data & Informasi Dinas P3A.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga;
- 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program dan kegiatan tahun 2025-2029, indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta bidang penanggung jawab berdasarkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					14.321.013.600		15.566.931.012		16.531.895.632		17.559.326.408		17.667.176.809	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.613.161.660		11.536.495.854		12.251.599.265		13.013.040.114		12.834.056.889	
Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indeks (Skala 0-100))	70	71	72	10.613.161.660	73	11.536.495.854	74	12.251.599.265	75	13.013.040.114	76	12.834.056.889	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					914.102.300		993.629.200		1.055.220.487		1.120.802.781		1.191.516.303	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,41	56,48	60	914.102.300	61	993.629.200	62	1.055.220.487	63	1.120.802.781	64	1.191.516.303	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1	1	2		2		3		4		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					807.442.000		877.689.454		932.094.078		990.024.026		1.052.486.474	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan	100	80	80	807.442.000	85	877.689.454	90	932.094.078	90	990.024.026	95	1.052.486.474	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

	Layanan Komprehensif (%)													Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					862.616.050		937.663.646		995.785.842		1.057.674.245		1.124.404.880	
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	10	862.616.050	15	937.663.646	20	995.785.842	25	1.057.674.245	30	1.124.404.880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					105.194.250		114.346.250		121.434.032		128.981.196		137.118.858	
Meningkatnya pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2	5	7	105.194.250	10	114.346.250	13	121.434.032	15	128.981.196	20	137.118.858	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					612.132.820		665.388.375		706.663.265		750.550.750		797.904.386	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	67,5	68,63	69,55	612.132.820	70,33	665.388.375	71,01	706.663.265	72	750.550.750	73	797.904.386	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					406.364.520		441.718.233		469.098.663		498.253.296		529.689.019	

Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	80	80	406.364.520	85	441.718.233	90	469.098.663	90	498.253.296	95	529.689.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	
Meningkatnya Pengendalian Penduduk					2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
Meningkatnya Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					18621013600.00		19866931012.00		20831895632.00		21859326408.00		21967176809.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN							
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
- Terwujudnya masyarakat inklusif dan peran pemuda dalam pembangunan	Mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang setara adil dan inklusif				Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)		
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan yang berprestektif Gender			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)		
					Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah. (%)		
					Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. (%)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)		
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

					jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.02.0006 - pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.02.0007 - monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	

					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	

					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.1.03.0009 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
					Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya Pencegahan kekerasan perlindungan Perempuan anak			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (%)		
					Rasio Kekerasan Terhadap Anak (%)		
			Meningkatnya Perlindungan Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	

					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	2.08.03.1.01.0005 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.03.1.01.0006 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0004 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang	2.08.03.1.02.0009 - layanan spesifik untuk pemulihan	

					mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	

					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	

					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.1.03.0009 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Perlindungan Anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.07.1.01.0008 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.07.1.01.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	

					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	

					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0011 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	

					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	2.08.07.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	
					jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.1.03.0012 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	2.08.07.1.03.0013 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak			Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (%)		

			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	

					jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	2.08.06.1.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.06.1.01.0008 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	

					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)	2.08.06.1.02.0007 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	
					Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.1.02.0008 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.1.02.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.06.1.02.0011 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.06.1.02.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)		

			Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indeks (Skala 0-100))	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.08.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.08.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	2.08.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.08.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.08.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.321.013.600		15.566.931.012		16.531.895.632		17.559.326.408		17.667.176.809		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.613.161.660		11.536.495.854		12.251.599.265		13.013.040.114		12.834.056.889		
Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indeks (Skala 0-100))	70	78	10.613.161.660	80	11.536.495.854	83	12.251.599.265	85	13.013.040.114	85	12.834.056.889	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.350.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.350.000.000	1	1.600.000.000	1	1.850.000.000	1	1.850.000.000	1	1.850.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)												
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)												
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1						

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1				
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	
2.08.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	
2.08.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	
2.08.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	

Perubahan DPA-SKPD	DPA-SKPD (Dokumen)													
2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
2.08.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
2.08.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		0		
2.08.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		0		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		0		

2.08.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		0		
2.08.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0		0		0		0		0		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)			0		0		0		0		0		
2.08.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0		0		0		0		0		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)			0		0		0		0		0		
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.800.000.00 0		6.750.000.00 0		6.900.000.00 0		6.900.000.00 0		6.500.000.00 0		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1	50	5.800.000.00 0	60	6.750.000.00 0	60	6.900.000.00 0	60	6.900.000.00 0	60	6.500.000.00 0		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.000.000.00 0		5.950.000.00 0		6.000.000.00 0		6.000.000.00 0		5.500.000.00 0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1	50	5.000.000.00 0	60	5.950.000.00 0	60	6.000.000.00 0	60	6.000.000.00 0	60	5.500.000.00 0		
2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				800.000.000		800.000.000		900.000.000		900.000.000		1.000.000.00 0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.00 0		
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		250.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		0			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		0			
2.08.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		250.000.000		

2.08.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		0		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0		
2.08.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		0		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0		
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	350.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1				1		1					
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1					
2.08.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		0		50.000.000		0		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50.000.000		0	1	50.000.000		0	1	50.000.000		
2.08.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000		
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				700.000.000		900.000.000		900.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		
Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	700.000.000		900.000.000		900.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN					
			2026	2027	2028	2029	2030							

SUBKEGIATAN OUTPUT			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000						
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	300.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000						
2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				700.000.000		0		0		400.000.000		400.000.000						
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			700.000.000		0		0		400.000.000		400.000.000						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)																	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)																	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)												1			1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1															
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1															
2.08.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau				0		0		0		0		0						

Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0	0	0	0	0	0	0	0			
2.08.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	0	0			400.000.000		400.000.000			
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000				
2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0	0	0			0		0			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			0	0	0			0		0			
2.08.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	0	0			0		0			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	0	0			0		0			
2.08.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0	0	0			0		0			
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	0	0			0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	500.000.000		0		0		0		0		
2.08.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		0		0		0		0		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	200.000.000	0	0	0	0	0	0						
2.08.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0	0	0						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	0	0	0	0	0	0						
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	0	1.150.000.000	0	1.200.000.000	0					
Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	0	1.150.000.000	0	1.200.000.000	0					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1									1	1	1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1									1	1	1	0	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1									1	1	1	1	
2.08.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000.000	300.000.000	300.000.000		300.000.000		300.000.000						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000				
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000	350.000.000	350.000.000		400.000.000		450.000.000						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	350.000.000	350.000.000	350.000.000		400.000.000		450.000.000						

2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0		
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				513.161.660		736.495.854		951.599.265		963.040.114		1.084.056.889		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			513.161.660		736.495.854		951.599.265		963.040.114		1.084.056.889		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		0		1		0		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1				1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)												
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.161.660		236.495.854		301.599.265		263.040.114		284.056.889	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	163.161.660	1	236.495.854	1	301.599.265	1	263.040.114	1	284.056.889	
2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	

Lainnya													
2.08.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0	0	0	0	0	0	0	0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0	0	0	0	0	0	0	0		
2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		100.000.000		0		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		0		100.000.000		0		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				914.102.300		993.629.200		1.055.220.487		1.120.802.781		1.191.516.303		

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1	2	914.102.300	2	993.629.200	3	1.055.220.487	4	1.120.802.781	5	1.191.516.303	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,41	60		61		62		63		64			
2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				375.000.000		375.000.000		350.000.000		350.000.000		525.000.000		
Jumlah Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	0	20	375.000.000	20	375.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	525.000.000		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	40	20		20		25		25		30			
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	20		20		20		20		20			
2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				100.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000		
2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				100.000.000		100.000.000		75.000.000		75.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000		
2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	0	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000		
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	40	20	50.000.000	20	50.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	30	100.000.000		
2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	20	50.000.000	20	50.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000		
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi				260.000.000		330.000.000		311.370.800		470.802.781		316.516.303		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	40	20	260.000.000	20	330.000.000	20	311.370.800	20	470.802.781	20	316.516.303		

dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	(Lembaga)													
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bintek atau pelatihan (Orang)	0	0	20	20	20	20	0						
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	40	20	20	20	30	20	20						
	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20	20	30	20	20	20	20						
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	1	1	1	1	1	1						
2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				70.000.000	70.000.000	91.370.800	100.000.000	100.000.000						
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	40	20	70.000.000	20	70.000.000	20	91.370.800	20	100.000.000	20	100.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.1.02.0006 - pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				70.000.000		70.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20	20	70.000.000	30	70.000.000	20	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
2.08.02.1.02.0007 - monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				70.000.000		70.000.000		50.000.000		100.000.000		66.516.303		
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	66.516.303		
2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		50.000.000		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	40	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	30	100.000.000	20	50.000.000		
2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				0		70.000.000		70.000.000		70.802.781		0		

Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	0	0	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.802.781	0	0		
2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				279.102.300		288.629.200		393.849.687		300.000.000		350.000.000		
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	20	279.102.300	20	288.629.200	25	393.849.687	25	300.000.000	25	350.000.000		
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5		5		5		10		15			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN					
			2026	2027	2028	2029	2030							

SUBKEGIATAN OUTPUT			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				99.102.300		100.000.000		100.000.000		75.000.000		75.000.000		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	1	99.102.300	1	100.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	20	50.000.000	20	50.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000		
2.08.02.1.03.0009 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				50.000.000		50.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.02.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				50.000.000		58.629.200		80.220.487		50.000.000		50.000.000		

terlaksananya pendampingan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	20	50.000.000	20	58.629.200	20	80.220.487	20	50.000.000	20	50.000.000		
2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		38.629.200		50.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5	30.000.000	5	30.000.000	5	38.629.200	10	50.000.000	15	100.000.000		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				807.442.000		877.689.454		932.094.078		990.024.026		1.052.486.474		
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	80	807.442.000	85	877.689.454	85	932.094.078	90	990.024.026	95	1.052.486.474	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				325.000.000		382.689.454		357.094.078		400.000.000		425.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	20	325.000.000	25	382.689.454	25	357.094.078	25	400.000.000	25	425.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000		
2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	20	75.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
2.08.03.1.01.0005 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		57.094.078		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	57.094.078	1	75.000.000	1	75.000.000		

2.08.03.1.01.0006 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				50.000.000		82.689.454		50.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	0	1	50.000.000	1	82.689.454	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				170.000.000		170.000.000		250.000.000		260.000.000		295.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	170.000.000	10	170.000.000	15	250.000.000	15	260.000.000	20	295.000.000		

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	5	10	10	15
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	13	10	10	15	15	15
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	0	10	10	10	10	10
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	5	10	10	10
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	10	5	5	10	10	15
Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	5	5	10	10

	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5		5		10		10		15			
2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
2.08.03.1.02.0004 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10.000.000	10	10.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	20	20.000.000		

2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	13	10	50.000.000	10	50.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000		
2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	10	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	15	30.000.000		
2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	15	30.000.000		

2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	20.000.000	5	20.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000		
2.08.03.1.02.0009 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	15	30.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		

Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Pengjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	13	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				312.442.000		325.000.000		325.000.000		330.024.026		332.486.474		
Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	0	1	312.442.000	1	325.000.000	1	325.000.000	1	330.024.026	1	332.486.474		
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	20	10		10		10		15		15			
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	10		10		15		15		15			
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				60.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	20	10	60.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000		
2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		80.024.026		100.000.000		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.024.026	1	100.000.000		
2.08.03.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

kewenangan provinsi	(Laporan)													
2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	10	75.000.000	10	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000		
2.08.03.1.03.0009 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				52.442.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		32.486.474		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5	52.442.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	32.486.474		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				862.616.050		937.663.646		995.785.842		1.057.674.245		1.124.404.880		
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	10	862.616.050	15	937.663.646	20	995.785.842	25	1.057.674.245	30	1.124.404.880	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				350.000.000		350.000.000		350.000.000		357.674.245		400.000.000		

Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Kebijakan)	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	357.674.245	1	400.000.000		
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	5		5		5		5		10			
2.08.04.1.01.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.08.04.1.01.0006 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Kebijakan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		57.674.245		100.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	57.674.245	10	100.000.000		
2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga				262.616.050		287.663.646		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	5	262.616.050	5	287.663.646	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)		5		5		5		5		5			

2.08.04.1.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				62.616.050		87.663.646		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	62.616.050	1	87.663.646	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.04.1.02.0005 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.04.1.02.0006 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)		5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		

	(Lembaga)													
2.08.04.1.02.0008 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000		300.000.000		345.785.842		400.000.000		424.404.880		
Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	250.000.000	10	300.000.000	10	345.785.842	20	400.000.000	20	424.404.880		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		20		20		20			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	15		20		20		20		20			

	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10		
2.08.04.1.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	15	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
2.08.04.1.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		95.785.842		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	20	95.785.842	20	100.000.000	20	100.000.000	
2.08.04.1.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
2.08.04.1.03.0005 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.1.03.0006 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		74.404.880		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	74.404.880		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				105.194.250		114.346.250		121.434.032		128.981.196		137.118.858		

Meningkatnya pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2	7	105.194.250	10	114.346.250	13	121.434.032	15	128.981.196	20	137.118.858	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				105.194.250		114.346.250		121.434.032		128.981.196		137.118.858		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	5	105.194.250	5	114.346.250	5	121.434.032	5	128.981.196	5	137.118.858		
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.08.05.1.01.0003 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.08.05.1.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		

lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak (Lembaga)	0	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000		
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi				25.194.250		34.346.250		41.434.032		48.981.196		57.118.858		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	25.194.250	1	34.346.250	1	41.434.032	1	48.981.196	1	57.118.858		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				612.132.820		665.388.375		706.663.265		750.550.750		797.904.386		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	67,5	69,55	612.132.820	70,33	665.388.375	71,01	706.663.265	72	750.550.750	73	797.904.386	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10		10		10		10		10			

	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	5		5		50		10		10			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.08.06.1.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	50	50.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000		
2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Usaha Kewenangan Provinsi														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.06.1.01.0008 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				362.132.820		415.388.375		456.663.265		450.550.750		497.904.386		
Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	30	362.132.820	40	415.388.375	45	456.663.265	45	450.550.750	50	497.904.386		
	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			

2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.1.02.0007 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.06.1.02.0008 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				60.000.000		65.000.000		80.000.000		80.000.000		90.000.000		

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	30	60.000.000	40	65.000.000	45	80.000.000	45	80.000.000	50	90.000.000		
2.08.06.1.02.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.06.1.02.0011 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.06.1.02.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				52.132.820		100.388.375		126.663.265		120.550.750		157.904.386		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	52.132.820	1	100.388.375	1	126.663.265	1	120.550.750	1	157.904.386		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				406.364.520		441.718.233		469.098.663		498.253.296		529.689.019		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	80	406.364.520	85	441.718.233	90	469.098.663	90	498.253.296	95	529.689.019	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				170.000.000		170.000.000		170.000.000		210.000.000		210.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	5	170.000.000	5	170.000.000	5	170.000.000	5	210.000.000	5	210.000.000		
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	5		5		5		10		10			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	0	1		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA				30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		

Kewenangan Provinsi														
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.07.1.01.0008 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.08.07.1.01.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000		
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10		10		10							
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10							
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10		10		10							
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	0	10		10		10							

	Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026	2027	2028	2029	2030						

SUBKEGIATAN OUTPUT			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
2.08.07.1.02.0011 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		

2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				156.364.520		191.718.233		219.098.663		208.253.296		239.689.019		
Jumlah Dokumen kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	0	5	156.364.520	5	191.718.233	5	219.098.663	10	208.253.296	10	239.689.019		
	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	1		1		1		1		1			

	(Dokumen)												
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5		5		5		10		10		
	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	10		10		10		10		10		
2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026	2027	2028	2029	2030						

SUBKEGIATAN OUTPUT			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.08.07.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
2.08.07.1.03.0012 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
2.08.07.1.03.0013 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi				31.364.520		66.718.233		94.098.663		68.253.296		99.689.019		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	0	1	31.364.520	1	66.718.233	1	94.098.663	1	68.253.296	1	99.689.019		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.300.000.00 0		4.300.000.00 0		4.300.000.00 0		4.300.000.00 0		4.300.000.00 0		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		
Meningkatnya Pengendalian Penduduk				2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		2.100.000.00 0		2.100.000.00 0	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				1.600.000.00 0		1.600.000.00 0		1.600.000.00 0		1.600.000.00 0		1.600.000.00 0			
Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Dokumen)	0	1	1.600.000.00 0	1	1.600.000.00 0	1	1.600.000.00 0	1	1.600.000.00 0	1	1.600.000.00 0			
	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan (Laporan)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Dokumen)														
	Jumlah kab/kota yang menerima Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota)	0	1		1		1		1		1		1		

	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Kab/Kota)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi (Kabupaten/Kota)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal (Dokumen)												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	0	1		1		1		1		1		
2.14.02.L01.0007 - Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	

2.14.02.1.01.0013 - Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya fasilitas pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang Efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitas kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi (Kabupaten/Kota)	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
2.14.02.1.01.0014 - Fasilitas pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
tersedianya fasilitas penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah fasilitas provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Kab/Kota)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.1.01.0018 - Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Dokumen)													
2.14.02.1.01.0019 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.14.02.1.01.0020 - Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.02.1.01.0021 - Advokasi dan Sosialisasi GDPK				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.14.02.1.01.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan (Laporan)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

2.14.02.1.01.0025 - Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kab/kota yang menerima Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.02.1.01.0026 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.02.1.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	0		0		0		0		0		0		

	(Dokumen)													
2.14.02.1.01.0028 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0	0	0	0	0	0	0	0			
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Dokumen)			0	0	0	0	0	0	0	0			
2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi				500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga (Dokumen)	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Organisasi)	0	1		1		1		1		1			
2.14.02.1.02.0009 - Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Organisasi)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)														
2.14.02.1.02.0011 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.02.1.02.0012 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.1.02.0013 - Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		

Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	2.08.2.14.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja (Daerah)	0	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Daerah)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Laporan)	0	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.14.03.1.01.0001 - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03.1.01.0010 - Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Daerah)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03.1.01.0011 - Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03.1.01.0012 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja (Daerah)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.1.01.0013 - Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.1.02 - PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	0	1		1		1		1		1			
2.14.03.1.02.0001 - Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Ber-KB														
Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03.1.02.0002 - Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)													
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		
Meningkatnya Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera				1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		1.100.000.00 0		1.100.000.00 0	2.08.2.14.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Daerah)	0	1		1		1		1		1			
2.14.04.1.01.0027 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tertindakannya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Daerah)	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		

Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagra) (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
2.14.04.1.02.0006 - Fasilitas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.14.04.1.02.0007 - Fasilitas kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya fasilitas kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitas pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	

kabupaten/kota	(Laporan)													
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.1.02.0010 - Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Laporan)													
2.14.04.1.02.0011 - Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi 2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.02.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
4.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Anak	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi 2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi 2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program-program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) maupun indikator tujuan dan sasaran (*impact*). Indikator kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program-program prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara 2025-2029. Secara berjenjang, penetapan indikator-indikator kinerja pada Dinas P3A Provinsi Maluku Utara akan membentuk sebuah hirarki kinerja (*performance tree*) sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,41	56,48	57,2	58,48	58,68	60	60,5	
2	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,15	67	67,1	67,4	67,6	67,8	67,9	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	29,14	27,6	26,07	24,53	23	21,47	19,92	
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	6,27	6,06	5,84	5,63	5,42	5,19	4,84	
5	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	80	80	85	90	90	95	
6	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	80	80	85	90	90	95	
7	Nilai SAKIP	Nilai	70	75	78	80	83	85	85	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
I	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks	80,01	80	81	82	83	84	85	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	%	55,41	56,48	60	61	62	63	64	
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	%	100	80	80	85	90	90	95	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	%	100	80	80	85	90	90	95	
5	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	%	30	40	40	50	60	70	80	
6	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	%	29,14	27,62	26,07	25	24	23	22	
7	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	%	6,27	6,06	5,84	5,5	5,4	5,3	5,2	
8	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	%	6,27	6,06	5,84	5,5	5,4	5,3	5,2	
II	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	Indeks	63,42	67	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	
1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	negatif	Angka	37,5	36	34	33	32	31	30	
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	negatif	Angka	2,43	2,36	2,34	2,32	2,3	2,28	2,26	
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	13	12,3	11,2	11	10,8	10,6	10,4	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra dalam pembangunan erat kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional sehingga keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan baik dalam RPJPD, RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2025 - 2029, dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini akan mengandung Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Selanjutnya renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dipahami seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari arah tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja

Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5.2. Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Renstra Dinas P3A mengacu pada Rencana Menengah Pembangunan daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas P3A Provinsi Maluku, dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD Maluku Utara. Renstra dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang ada di lingkungan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara, dan dapat menjadi acuan bagi para pemangku peran terkait di Provinsi Maluku Utara, sehingga tercipta sinergitas dalam pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Renstra ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean government and good governance* di lingkungan Dinas P3A Provinsi Maluku Utara.

Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas P3A Provinsi Maluku Utara dan masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan dapat bersinergi dalam melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan

- tahunan, yang bersandar pada “Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”;
3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
 4. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara tujuan dan sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan tujuan dan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas;
 5. Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara akan dilakukan evaluasi/ penyempurnaan setiap tahun, sesuai perkembangan atau perubahan dan dinamika masyarakat dan permasalahan sektor P3A di Provinsi Maluku Utara.

Semoga Renstra Dinas P3A Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



Sofifi, 03 Februari 2025

Kepala Dinas,

Dra. Hairiah, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196707081993032012